EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN MINAPOLITAN PERIKANAN TANGKAP DI PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA (PPN) BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN JAWA TIMUR

SKRIPSI

PROGRAM STUDI PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN
JURUSAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN

Oleh:

REJEKI AMALIA

NIM. 0810820048

FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2013

repository.ub.ac.id

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN MINAPOLITAN PERIKANAN TANGKAP DI PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA (PPN) BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN JAWA TIMUR

SKRIPSI

PROGRAM STUDI PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN
JURUSAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Perikanan di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya

Oleh:

REJEKI AMALIA

NIM. 0810820048

FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2013

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

SKRIPSI

EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN MINAPOLITAN PERIKANAN TANGKAP DI PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA (PPN) BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN JAWA TIMUR

Oleh :
REJEKI AMALIA
NIM. 0810820048

telah dipertahankan didepan penguji
pada tanggal 3 Juli 2013
dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui,

Dosen Penguji I	Dosen Pembimbing I
(Dr. Ir. Tri Djoko Lelono, M.Si)	(Prof. Dr. Ir. Sahri Muhammad, MS)
NIP. 19610909 1986021 002	NIP. 19431023 19691 001
Tanggal : 30 JUL 2013	Tanggal : 30 JUL 2013
Dosen Penguji II	**Dosen Pembimbing II**
(Sunardi, ST, MT)	(Dr. Ir. Daduk Setyohadi, MP)
NIP. 19800605 2006041 004	NIP. 19630608 197031 003
Tanggal : 30 JUL 2013	Tanggal : 30 JUL 2013

Mengetahui
A.n Ketua Jurusan

(Ir. Nurin Hidayati, ST.,M.Sc)
NIP. 19781102 2005012 002
Tanggal : 30 JUL 2013

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah tertulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atasperbuatan tersebut.

Malang, April 2013

Mahasiswa

REJEKI AMALIA

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyadari tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, laporan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Karena itu penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada yang terhormat :

1. **Kedua orang tua dan kakak-kakakku tercinta** atas dorongan yang kuat, kebijaksanaan dan do'a – do'anya. Terutama mamaku tersayang, YOU ARE MY ANGEL.
2. **Bapak Prof. Dr. Ir. Sahri Muhammad, MS dan Dr. Ir. Daduk Setyohadi, MP** selaku dosen pembimbing atas segala bimbingan dan pengarahan yang telah diberikan selama proses peyusunan skripsi.
3. **Bapak Dr. Ir. Tri Djoko Lelono, M.Si dan Sunardi, ST, MT** selaku penguji yang telah memberikan kritik serta saran untuk kesempurnaan penulisan skripsi.
4. S**eluruh pihak dari Dinas PPN Brondong dan bapak Kiswandi** selaku kepala UPT. Kabupaten Brondong atas data dan informasi yang diberikan serta para responden atas kerjasamanya selama penelitian.
5. **Mas igo Sukma Permana S.Pi** yang telah memberikan informasi dan arahan selama penelitian.
6. Kekasihku tercinta **"kak mat"** atas bantuan, semangat dan dukungannya selama ini "you are my spirit".
7. Keluarga serta sahabat terbaikku, "thank you for your support" :
   - Kakak dan abangku tersayang **fenong** dan **jelo**, sepupuku **rudi** dan **ade**.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

- **Wiwin** dan **ita** sahabat terbaikku
- **AL**, **uki**, **sublus**, **atun**, **ricky**, **davin** dan semua teman-teman sape lainnya, kalian pengobat stressku.
- **Okta**, **zein**, **rizal**, **ubur**, **ary**, **dio**, **fony**, **nia**, **ani**, **daktil** dan semua teman-teman PSPK'08 lainnya.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

RINGKASAN

REJEKI AMALIA. Laporan Skripsi Tentang Efektivitas Implementasi Program Pengembangan Kawasan Minapolitan Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong Kabupaten Lamongan Jawa Timur. (Dibawah bimbingan **Prof. Dr. Ir. Sahri Muhammad, MS dan Dr. Ir. Daduk Setyohadi, MP**)

Sumberdaya pada sektor perikanan merupakan salah satu sumberdaya yang penting bagi hajat hidup masyarakat dan memiliki potensi dijadikan sebagai penggerak utama (*prime mover*) ekonomi nasional. Hal ini didasari pada kenyataan bahwa Indonesia memiliki sumberdaya perikanan yang besar baik ditinjau dari kuantitas maupun diversitas serta memiliki keterkaitan dengan sektor-sektor lainnya. Potensi sumberdaya alam yang ada juga turut mendukung program minapolitan ini sebagai salah satu wilayah yang masuk dalam kebijakan rencana pengembangan kawasan pesisir Pemerintah Brondong Kabupaten Lamongan. Salah satu potensi yang sangat mendominasi adalah wilayah pesisir yang masih berpotensi untuk dijadikan sebagai pengembangan wilayah pesisir guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Struktur pelaku pemerintahan kita yang sering berubah-ubah, termasuk *reshuffle* Menteri Perikanan dan Kelautan Fadel Muhammad sebagai pencetus minapolitan, dan digantikan oleh Sharif Cicip Sutardjo yang membawa program baru yaitu Industrialisasi Perikanan. Adanya kebijakan yang tumpang tindih ini menimbulkan pertanyaan bagaimanakah hasil dari implementasi program minapolitan kedepannya, sehingga perlu diketahui efektivitas dari implementasi pengembangan kawasan minapolitan itu sendiri.

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk : 1) Mengevaluasi tingkat keberhasilan kegiatan program pengembangan kawasan minapolitan ditinjau dari tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan pelaksana dan peserta/penerima kegiatan, 2) Mengetahui tingkat perubahan yang dirasakan oleh masyarakat pesisir terhadap kegiatan program pengembangan kawasan minapolitan, 3) Mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam program pengembangan kawasan minapolitan perikanan tangkap di PPN Brondong.

Penelitian ini dilaksanakan di kawasan PPN Brondong yang terletak di desa Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan pada bulan September 2012. Penelitian ini dirancang sebagai penelitian survei yang bersifat

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode yang menggambarkan keadaan atau kejadian-kejadian pada suatu daerah tertentu. Dalam metode ini pengambilan data dilakukan tidak hanya terbatas pada pengumpulan dan penyusunan data, tapi meliputi analisis dan pembahasan tentang data tersebut. Data primer diperoleh dengan wawancara, observasi dan kuesioner sedangkan data sekunder diperoleh dengan dokumentasi dan studi pustaka.

Profil program pengembangan kawasan minapolitan perikanan tangkap di Kabupaten Lamongan yaitu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lamongan No 188/152/Kep/413.013/2011, tanggal 14 juni 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Lamongan nomor 188/213/Kep/413.013/2010 Tentang Penetapan Kawasan Minapolitan Kabupaten Lamongan Tahun 2010, maka minapolitan perikanan tangkap di wilayah Kabupaten Lamongan terletak di Kecamatan Brondong sebagai sentra Kawasan minapolitan (minapolis) dengan Pusat Pengelolaan Minapolitan (PPM) di PPN Brondong, dan Kecamatan Paciran sebagai kawasan pendukung atau *hinterland*. Berdasarkan SK Bupati tersebut ditetapkan juga tim POKJA (Kelompok Kerja) untuk membantu melaksanakan peran pemerintah dalam pengembangan kawasan minapolitan dan komoditas unggulannya yaitu ikan tongkol, kembungm layang dan kuniran. Secara umum minapolitan berbasis perikanan tagkap di Kabupaten Lamongan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nelayan di Kabupaten Lamongan dengan tetap memperhatikan kelestarian sumberdaya ikan dan keberlangsungan stok di laut. Serta sasarannya adalah pengentasan kemiskinan di pusat kegiatan (minapolis) dan kawasan pendukung sekitarnya (*hinterland*).

Hasil dari evaluasi terhadap tingkat keberhasilan komponen program pengembangan kawasan minapolitan ditinjau dari nilai kepentingan dan kepuasan responden yaitu diperoleh variabel yang masuk pada kuadran A adalah pembangunan breakwater, pengadaan rumpon dasar, pembinaan KUB perikanan tangkap, pengadaan timbangan ikan, pengadaan payang teri dan pengadaan peralatan pendukung PPDI paket 1. Kuadran B yaitu pavingstone jalan pesisir kec. Paviran, perencanaan, pengawasan dan pemborongan jalan, rehabilitasi breakwater, pembangunan kantor POKMASWAS, pengadaan alat tangkap bubu, review masterplan dan pengadaan peralatan pendukung PPDI paket 2. Tidak terdapat komponen atau variabel yang termasuk dalam kuadran C. Sedangkan kuadran D yaitu pemborongan pengadaan instalasi listrik.

Tingkat perubahan yang dirasakan oleh masyarakat belum maksimal (30%) baik terhadap produksi perikanan, kualitas produk perikanan dan pendapatan sebagai hasil dari pegadaan sarana dan prasarana maupun pengadaan alat tangkap.

Faktor – faktor pendukung program diantaranya adalah pelabuhan Brondong beroperasi dengan status sebagai Pelabuhan Perikanan Nusantara atau pelabuhan tipe B, letak Kabupaten Lamongan yang strategis sebagai daerah penyangga kota propinsi (Surabaya), permintaan pasar untuk ikan segar maupun olahan masih sangat tinggi, sebagian besar masyarakat nelayan menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan. Sedangkan faktor – faktor penghambatnya yaitu kualitas SDM nelayan masih rendah, sumberdaya perikanan Laut Jawa mengalami *over fishing*, adanya keterbatasan dana.

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, maka beberapa saran yang bisa diberikan untuk menunjang keberlanjutan program pegembangan kawasan minapolitan perikanan tangkap di PPN Brondong Kabupaten Lamongan yaitu 1) pemerintah daerah hendaknya mencari sumber pendanaan lain yang sah, misalnya dari BUMD sebagai alternatif untuk menambah kekurangan dana, 2) masih perlu mengoptimalkan sosialisasi maupun pelaksanaan kegiatan, 3) masih perlu dilakukan evaluasi agar hasilnya bisa lebih optimal.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT , atas segala limpahan rahmat dan hidayahNya penulis dapat menyajikan Laporan Skripsi yang berjudul “Efektivitas Terhadap Implementasi Program Pengembangan Kawasan Minapolitan Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong Kabupaten Lamongan Jawa Timur”. Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana perikanan di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya Malang.

Dalam tulisan ini, disajikan pokok – pokok bahasan terkait minapolitan perikanan tangkap yang meliputi ; profil, evaluasi tingkat keberhasilan serta faktor pendukung dan penghambat program. Penulis sangat menyadari akan kekurangan dan keterbatasan kemampuan diri penulis.oleh karena itu penulis akan sangat berterima kasih terhadap berbagai masukan, saran dan kritikan yang membangun untuk dapat memperbaiki berbagai kekurangan dan kesalahan yang ada demi kesempurnaan laporan ini dan di masa – masa yang akan datang.

Malang, April 2013

Penulis

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN i
PERNYATAAN ORISINALITAS ii
UCAPAN TERIMA KASIH iii
RINGKASAN v
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL xii
DAFTAR GAMBAR xiii
DAFTAR LAMPIRAN xiv

I. PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 4
1.3 Tujuan Penelitian 4
1.4 Manfaat Penelitian 5
1.5 Tempat dan Waktu Penelitian 5

II. TINJAUAN PUSTAKA 6
2.1 Profil Program Minapolitan Perikanan Tangkap 6
2.1.1 Definisi Minapolitan 6
2.1.2 Tujuan Minapolitan 7
2.1.3 Karakteristik Kawasan Minapolitan 7
2.2 Perencanaan Program 8
2.2.1 Teori Perencanaan Program 8
2.2.2 Perencanaan Minapolitan 9
2.3 Implementasi Program 13
2.3.1 Teori Implementasi Program 13
2.3.2 Implementasi Program Minapolitan 15
2.4 Pengembangan Kawasan Minapolitan 19
2.4.1 Persyaratan Kawasan Minapolitan 20
2.4.2 Tata Laksana Pengembangan Kawasan Minapolitan 21
2.4.3 Kelembagaan Minapolitan 23
2.5 Partisipasi Masyarakat 23

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

2.6 Faktor Pendukung dan Penghambat Program 25
2.7 Hasil Penelitian Terdahulu 25
2.8 Analisis IPA (*Importance Performance Analysis*) 27

III. METODE PENELITIAN 30
3.1 Lokasi Penelitian 30
3.2 Metode Penelitian 30
3.3 Teknik Pengambilan Data Penelitian 31
3.3.1 Data Primer 31
3.3.2 Data Sekunder 32
3.4 Metode Sampling 32
3.5 Alur Penelitian 35
3.6 Metode Analisa Data 35
3.5.1 Analisis Deskriptif 36
3.5.2 Analisis Evaluatif 36

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 41
4.1 Kondisi Umum Lokasi Penelitian 41
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Lamongan 41
4.1.2 Gambaran Umum Daerah Kawasan Minapolitan 44
4.1.3 Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong 47
4.2 Profil Minapolitan Perikanan Tangkap Kab.Lamongan 53
4.2.1 Visi dan Misi 53
4.2.2 Kawasan Minapolitan 54
4.2.3 Komoditas Unggulan 54
4.2.4 Pengelola Minapolitan 55
4.2.5 Implementasi Minapolitan 56
4.3 Analisa Importance Performance Analysis (IPA) 59
4.3.1 Analisis IPA setiap indikator kualitas pelayanan 60
4.3.2 Tingkat Kesesuaian (%) 66
4.4 Analisis Tingkat Perubahan 67
4.5 Faktor Pendukung dan Penghambat 69

V.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

KESIMPULAN DAN SARAN 72
5.1 Kesimpulan 72
5.2 Saran 73

DAFTAR PUSTAKA 74
LAMPIRAN 76

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1. Bobot antara Kepentingan dan Kinerja 38
2. Jumlah Penduduk Kabupaten Lamongan berdasarkan jenis kelamin 43
3. Luas wilayah dan jumlah penduduk di Kecamatan Brondong 46
4. Jumlah penduduk Kecamatan Brondong berdasarkan mata pencaharian 46
5. Daftar pegawai pelabuhan perikanan berdasarkan golongan dan tingkat pendidikan 49
6. Pemanfaatan lahan untuk fasilitas pelabuhan 49
7. Pemanfaatan lahan oleh pihak umum 49
8. Fasilitas pokok PPN Brondong 50
9. Fasilitas penunjang PPN Brondong 51
10. Fasilitas fungsional PPN Brondong 51
11. Kegiatan operasional di PPN Brondong 52
12. Susunan tim POKJA minapolitan Kabupaten Lamongan 55
13. Perhitungan rata-rata tingkat kepentingan dan rata-rata tingkat kepuasan per indikator 60
14. Tingkat kesesuaian komponen 67
15. Analisis deskriptif kuesioner 68

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1. Model Eksisting Minapolitan 17
2. Model Konseptual dan Potensial Kajian Minapolitan 18
3. Kerangka Implementasi Model Praktikal Minapolitan 19
4. Pembagian Kuadran *Importance Performance Analysis* 28
5. Alur Penelitian 35
6. Diagram IPA 39
7. Struktur Organisasi PPN Brondong..... 48
8. (a) Ikan Tongkol, (b) Ikan Layang, (c) Ikan Kembung 55
9. Diagram IPA data yang telah diolah 61
10. Bangunan *Breakwater* 63

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Halaman

1. Peta Kabupaten Lamongan dan Masterplan Pengembangan Kawasan Minapolitan 76
2. Areal Pelabuhan 77
3. Beberapa Fasilitas Penunjang di Kawasan PPN Brondong..... 79
4. Dokumentasi pengambilan data dan penyebaran kusisioner 81
5. Karakteristik Responden..... 83
6. Masterplan Pengembangan Tata Ruang di Kawasan PPN Brondong 84
7. Matrik Program Minapolitan Perikanan Tangkap Kabupaten Lamongan tahun 2012..... 86
8. Data Mentah Analisis IPA 93
9. Data Mentah Analisis Deskriptif 94

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumberdaya pada sektor perikanan merupakan salah satu sumberdaya yang penting bagi hajat hidup masyarakat dan memiliki potensi dijadikan sebagai penggerak utama (*prime mover*) ekonomi nasional. Hal ini didasari pada kenyataan bahwa Indonesia memiliki sumberdaya perikanan yang besar baik ditinjau dari kuantitas maupun diversitas serta memiliki keterkaitan dengan sektor-sektor lainnya. Walaupun sektor perikanan memiliki peran yang penting, akan tetapi sampai saat ini peran dan potensi tersebut belum dikelola secara optimal baik ditinjau dari perspektif pendayagunaan potensi yang ada maupun perspektif pembangunan yang berkelanjutan. Keunggulan komparatif yang dimiliki belum mampu untuk ditransformasikan menjadi keunggulan kompetitif. Hal tersebut mengakibatkan rendahnya kinerja sektor ekonomi berbasis perikanan. Pembangunan suatu kawasan minapolitan perikanan tangkap diharapkan bisa membantu pemecahan permasalahan pembangunan perikanan tangkap dan meningkatkan kesejahteraan nelayan dan penduduk wilayah pesisir yang berada dalam lingkup kawasan minapolitan (KKP, 2011).

Berbagai kebijakan program dan kegiatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan telah dilaksanakan dan dirasakan manfaatnya. Namun sejalan dengan perubahan yang begitu cepat di segala bidang, baik secara internasional maupun nasional maka kebijakan program dan kegiatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan memerlukan perubahan atau penyesuaian. Sebuah penanganan yang cepat dan tepat mutlak dibutuhkan agar dapat memenuhi kebutuhan ekonomi yang lebih fokus pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sebuah kebijakan terobosan yang dicanangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP-RI) adalah melalui Revolusi Biru, yaitu

sebuah perubahan cara berpikir dari daratan ke maritim. Revolusi Biru telah mengubah orientasi pembangunan yang sebelumnya hanya terkonsentrasi pada wilayah daratan telah meluas pada pembangunan wilayah maritim yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. KKP-RI melalui misinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan dalam rangka mencapai visi “Indonesia Penghasil Produk Kelautan dan Perikanan Terbesar 2015”, merealisasikan kebijakan tersebut melalui program minapolitan.

Potensi sumberdaya alam yang ada juga turut mendukung program minapolitan ini sebagai salah satu wilayah yang masuk dalam kebijakan rencana pengembangan kawasan pesisir Pemerintah Brondong Kabupaten Lamongan. Salah satu potensi yang sangat mendominasi adalah wilayah pesisir yang masih berpotensi untuk dijadikan sebagai pengembangan wilayah pesisir guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 39 Tahun 2011 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan, Kabupaten Lamongan telah ditetapkan sebagai kawasan ke-103 dari 223 lokasi yang telah ditetapkan sebagai kawasan minapolitan, dengan basis perikanan tangkap dan budidaya.

Untuk mewujudkan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong sebagai kawasan minapolitan, pengelola PPN Pantura Lamongan telah menyusun *business plan*. Salah satu konsepnya adalah menjadikan PPN Brondong sebagai *mall* perikanan, dengan menggandeng investor swasta di bidang perbengkelan dan *docking*, pabrik es dan *cold storage*. Sebagai daya dukung perikanan tangkap di pantura Lamongan telah beroperasi delapan unit industri pengolahan ikan, sekitar 252 unit pengolahan skala rumah tangga, lima sentra produksi perikanan tangkap, 28.154 nelayan dengan produksi ikan tahun 2010 mencapai 61.431 ton, serta 7.526 unit armada perikanan tangkap dengan

bobot mati 5 hinga 20 GT (*gross tonnage*) dan jumlah alat tangkap mencapai 8.395 unit (Surabayapost.co.id, 2011).

Pertumbuhan ekonomi dikawasan minapolitan dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal, terutama kebocoran ekonomi. Sehingga minapolitan yang akan dilaksanakan secara terintegrasi multi-sektoral merupakan megaproyek yang patut dikawal untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan.

Kekhawatiran ini juga diperparah dengan struktur pelaku pemerintahan kita yang sering berubah-ubah, termasuk *reshuffle* Menteri Perikanan dan Kelautan Fadel Muhammad sebagai pencetus minapolitan, dan digantikan oleh Sharif Cicip Sutardjo yang membawa program baru yaitu Industrialisasi Perikanan. Adanya kebijakan yang tumpang tindih ini menimbulkan pertanyaan bagaimanakah hasil dari implementasi program minapolitan kedepannya, sehingga perlu diketahui efektivitas dari implementasi pengembangan kawasan minapolitan itu sendiri.

Minapolitan ialah proses yang dinamis secara siklik, melibatkan peran multi-sektor secara terintegrasi dan berkelanjutan. Oleh karena itu, program minapolitan harus dievaluasi untuk mengukur keberhasilan atau bahkan kegagalan program (Wiadnya, 2011). Evaluasi dilakukan baik terhadap proses maupun efektivitas kebijakan (Suharto, 2008).

Pentingnya evaluasi agar diketahui tingkat keberhasilan dan tingkat perubahan yang dirasakan oleh masyarakat pesisir dari pelaksanaan kegiatan. Hasil evaluasi selanjutnya digunakan sebagai informasi dasar bagi pengelola dalam memperbaiki atau memperbaharui program ke depan. Oleh karena itu, dukungan dari semua pihak yang terkait dalam proses perencanaan maupun implementasi program minapolitan mutlak dibutuhkan termasuk dari perguruan tinggi atau akademisi.

Sebagai salah satu upaya meningkatkan pengetahuan dalam mengetahui "Efektivitas Implementasi Program Pengembangan Kawasan Minapolitan Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong Kabupaten Lamongan Jawa Timur" perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada Efektivitas Terhadap Implementasi Program Pengembangan Kawasan Minapolitan Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong Kabupaten Lamongan Jawa Timur, adalah sebagai berikut :

1. Seberapa besarkah keberhasilan program Pengembangan Kawasan Minapolitan ditinjau dari tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan pelaksana dan penerima formulasi kebijakan (masyarakat pesisir)?
2. Seberapa besarkah tingkat perubahan yang dirasakan oleh masyarakat pesisir terhadap kegiatan program pengembangan kawasan minapolitan?
3. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam program pengembangan kawasan minapolitan perikanan tangkap di PPN Brondong?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian pengaruh program minapolitan terhadap pengembangan alternatif lapangan kerja wilayah pesisir di Kabupaten Lamongan Jawa Timur adalah sebagai berikut :

1. Mengevaluasi tingkat keberhasilan kegiatan program Pengembangan Kawasan Minapolitan ditinjau dari tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan pelaksana dan peserta/penerima kegiatan.
2. Mengetahui tingkat perubahan yang dirasakan oleh masyarakat pesisir terhadap kegiatan program pengembangan kawasan minapolitan.

3. Mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam program pengembangan kawasan minapolitan perikanan tangkap di PPN Brondong.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat bagi berbagai pihak diantaranya :

1. Bagi kalangan akademisi berguna sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan reverensi untuk menunjang penelitian selanjutnya khususnya di bidang program minapolitan.
2. Bagi pemerintah atau instansi terkait, dapat dimanfaatkan sebagai reverensi baru dalam pengambilan kebijakan.
3. Bagi masyarakat, Sebagai sosialisasi terhadap kebijakan pemerintah sehingga dapat memahami, menerima dan menyikapi program tersebut.

1.5 Tempat dan Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan di Brondong Kabupaten Lamongan pada bulan September 2012.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Profil Minapolitan Perikanan Tangkap

2.1.1 Definisi Minapolitan

Secara umum definisi program minapolitan menurut KKP (2011), merupakan konsep pembangunan berbasis manajemen ekonomi kawasan dengan motor penggerak di sektor kelautan dan perikanan. Sistem manajemen kawasan minapolitan didasarkan pada prinsip integrasi, efisiensi, kualitas dan akselerasi tinggi.

4. Prinsip integrasi, diharapkan dapat mendorong agar pengalokasian sumberdaya pembangunan direncanakan dan dilaksanakan secara menyeluruh atau holistik dengan mempertimbangkan kepentingan dan dukungan *stakeholders*, baik instansi sektoral, pemerintah pusat dan daerah, kalangan dunia usaha maupun masyarakat.
5. Prinsip efisiensi, pembangunan sektor kelautan dan perikanan harus dilaksanakan secara efisien agar pembangunan dapat dilaksanakan dengan biaya murah namun mempunyai daya guna yang tinggi.
6. Prinsip berkualitas, pelaksanaan pembangunan sektor kelautan dan perikanan harus berorientasi pada kualitas, baik sistem produksi secara keseluruhan, hasil produksi, teknologi maupun sumberdaya manusia.
7. Prinsip berakselerasi tinggi, percepatan diperlukan untuk mendorong agar target produksi dapat dicapai dalam waktu cepat, melalui inovasi dan kebijakan terobosan.

Minapolitan Perikanan Tangkap didefinisikan sebagai kawasan pengembangan ekonomi wilayah berbasis usaha penangkapan ikan yang dikembangkan secara bersama oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk menciptakan iklim usaha yang lebih baik untuk pertumbuhan ekonomi,

penciptaan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Konsep manajemen pengelolaan minapolitan perikanan tangkap didasarkan pada konsep membangun sistem manajemen perikanan tangkap yang berbasis pada kemudahan nelayan bekerja dan memotivasi mereka untuk meningkatkan pendapatan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan. Disamping itu, juga memberikan kemudahan nelayan dalam bekerja dengan penyediaan sarana dan prasarana (pelabuhan perikanan, galangan kapal, bengkel, SPDN/SPBN, unit pengolahan ikan, pabrik es dan unit pemasaran) di sentra-sentra nelayan, penyederhanaan perijinan dan penyediaan permodalan (HKTI, 2011).

2.1.2 Tujuan Minapolitan

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 18 tentang Pedoman Umum Minapolitan Tahun 2011, tujuan minapolitan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan produksi, produktivitas dan kualitas produk kelautan dan perikanan
2. Meningkatkan pendapatan nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah ikan yang adil dan merata
3. Mengembangkan kawasan Minapolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi daerah.

2.1.3 Karakteristik Kawasan Minapolitan

Berdasarkan Kepmen Kelautan dan Perikanan No.18 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Minapolitan, maka kawasan minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/ atau kegiatan pendukung lainnya. Kawasan minapolitan akan dijadikan kawasan ekonomi unggulan yang dapat mendorong percepatan pembangunan ekonomi di

daerah untuk kesejahteraan masyarakat lokal. Karakteristik kawasan minapolitan meliputi :

1. Suatu kawasan ekonomi yang terdiri atas sentra produksi, pengolahan dan/atau pemasaran dan kegiatan usaha lainnya, seperti jasa dan perdagangan
2. Mempunyai sarana dan prasarana sebagai pendukung aktivitas ekonomi
3. Menampung dan mempekerjakan sumberdaya manusia di dalam kawasan dan daerah sekitarnya
4. Mempunyai dampak positif terhadap perekonomian di daerah sekitarnya

Batasan kawasan minapolitan bukan berdasarkan wilayah administratif namun terdiri dari zona inti, zona pengembangan, batas koordinat RUTR zona perikanan, dan zona keterkaitan. Sedangkan lokasi kegiatannya sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No 39 tahun 2011 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan (Zulham, 2010).

2.2 Perencanaan Program

2.2.1 Teori Perencanaan Program

Menurut Karding (2008), program dapat diartikan menjadi dua istilah yaitu program dalam arti khusus dan program dalam arti umum. Pengertian secara umum dapat diartikan bahwa program adalah sebuah bentuk rencana yang akan dilakukan. Apabila “program” ini dikaitkan langsung dengan evaluasi program maka program didefinisikan sebagai unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Dengan demikian yang perlu ditekankan bahwa program terdapat 3 unsur penting yaitu :

a. Program adalah realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan.

b. Terjadi dalam kurun waktu yang lama dan bukan kegiatan tunggal tetapi jamak berkesinambungan.

c. Terjadi dalam organisasi yang melibatkan sekelompok orang.

Lebih lanjut Karding (2008) menjelaskan pengertian program adalah suatu unit atau kesatuan kegiatan maka program sebuah sistem, yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan bukan hanya satu kali tetapi berkesinambungan. Pelaksanaan program selalu terjadi dalam sebuah organisasi yang artinya harus melibatkan sekelompok orang.

Mardikanto (1993) *dalam* Yustina (2003) mendefinisikan perencanaan program sebagai suatu prosedur kerja bersama-sama masyarakat dalam upaya untuk merumuskan masalah (keadaan-keadaan yang belum memuaskan) dan upaya pemecahan yang mungkin dapat dilakukan demi tercapainya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Perencanaan program sebagai upaya sadar yang dirancang atau dirumuskan guna tercapainya tujuan (Kebutuhan, keinginan, minat) masyarakat, untuk siapa program tersebut ditujukan. Di dalam perencanaan program, sedikitnya terdapat tiga pertimbangan yang menyangkut: hal-hal, waktu, dan cara kegiatan-kegiatan yang direncanakan itu dilaksanakan. Perencanaan program merupakan proses berkelanjutan, melalui mana warga masyarakat merumuskan kegiatan-kegiatan yang berupa serangkaian aktivitas yang diarahkan untuk tercapainya tujuan-tujuan tertentu yang diinginkan masyarakat setempat.

2.2.2 Perencanaan Minapolitan

Untuk mengetahui perencanaan dari program minapolitan maka dapat dilihat dari konsep dan strategi minapolitan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Minapolitan.

a. Konsep Minapolitan

Secara konseptual minapolitan memiliki 2 unsur utama yaitu minapolitan sebagai konsep pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis wilayah, dan minapolitan sebagai kawasan ekonomi unggulan dengan komoditas utama produk kelautan dan perikanan. Konsep minapolitan didasarkan pada tiga asas yaitu demokratisasi ekonomi kelautan dan perikanan pro rakyat, keberpihakan pemerintah pada rakyat kecil melalui pemberdayaan masyarakat, dan penguatan peran ekonomi daerah dengan prinsip daerah kuat maka bangsa dan negara kuat. Ketiga prinsip tersebut menjadi landasan perumusan kebijakan dan kegiatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan agar pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan benar-benar untuk kesejahteraan rakyat dan menempatkan daerah pada posisi sentral dalam pembangunan.

Pengalaman menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi kelautan dan perikanan yang ada pada umumnya berada di pedesaan lambat berkembang karena kurangnya sarana, prasarana dan fasilitas pelayanan umum. Kualitas sumberdaya manusia juga relatif rendah dibandingkan dengan sumberdaya manusia perkotaan. Kawasan pedesaan lebih banyak berperan sebagai penyedia bahan baku, sedangkan nilai tambah produknya lebih banyak dinikmati di perkotaan. Definisi minapolitan menurut Zulham (2010) yaitu, minapolitan adalah kawasan pembangunan pedesaan dengan infrastruktur setara kota yang tumbuh berkelanjutan sebagai sistem produksi berbasis sumberdaya dan atau komoditas kelautan dan perikanan unggulan lokal, berorientasi pasar, serta memiliki keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan dalam satuan sistem minabisnis dan pemukiman.

Dengan konsep minapolitan, pembangunan sektor kelautan dan perikanan diharapkan dapat dipercepat. Kemudahan-kemudahan atau

peluang yang biasanya ada di perkotaan perlu dikembangkan di pedesaan. Seperti prasarana, sistem pelayanan umum, jaringan distribusi bahan baku dan hasil produksi di sentra produksi. Sebagai sentra produksi, pedesaan diharapkan dapat berkembang sebagaimana perkotaan dengan dukungan prasarana, energi, jaringan distribusi bahan baku dan hasil produksi, transportasi, pelayanan publik, akses permodalan, dan sumberdaya manusia yang memadai.

b. Strategi Minapolitan

Untuk mencapai tujuan kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan dengan konsep minapolitan dilaksanakan dengan langkah-langkah strategis sebagai berikut :

1. Kampanye nasional melalui media massa, komunikasi antar lembaga dan pameran
2. Menggerakkan produksi, pengolahan, dan/ atau pemasaran di sentra produksi unggulan pro usaha kecil
3. Mengintegrasikan sentra produksi, pengolahan, dan /atau pemasaran menjadi kawasan ekonomi unggulan daerah menjadi kawasan minapolitan
4. Pendampingan usaha dan bantuan teknis di sentra produksi, pengolahan dan/ atau pemasaran unggulan berupa penyuluhan, pelatihan dan bantuan teknis
5. Pengembangan sistem ekonomi kelautan dan perikanan berbasis wilayah

Sasaran peningkatan produksi dengan konsep minapolitan berbasis perikanan tangkap adalah sebagai berikut :

4. Pelabuhan perikanan dan TPI menjadi sentra produksi pro nelayan, pendaratan, perdagangan dan distribusi hasil penangkapan ikan mampu menggerakkan ekonomi nelayan

5. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) yang potensial dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan dengan produktivitas dan kualitas tinggi pro nelayan

Dengan bentuk kegiatannya adalah sebagai berikut :

- Menetapkan pelabuhan perikanan dan TPI unggulan sebagai sentra produksi binaan
- Meningkatkan aksesbilitas nelayan terhadap sumberdaya alam dengan memperluas hak-hak pemanfaatan dan perlindungannya
- Revitalisasi sarana tempat pendaratan ikan, pelelangan, *cold storage* dan pabrik es
- Revitalisasi prasarana, seperti jalan, air bersih dan listrik
- Bantuan teknis dan permodalan, menghadirkan lembaga keuangan, pusat penjualan sarana produksi, BBM dan logistik murah di pelabuhan dan TPI
- Mengembangkan sistem manajemen pelabuhan efisien, bersih dan sehat
- Menertibkan pungutan-pungutan dan retribusi yang memberatkan masyarakat
- Restrukturisasi armada, wilayah penangkapan dan perizinan
- Pengkayaan stok ikan (*stock enhancement*) sebagai penyangga produksi
- Pengembangan alat penangkapan ikan yang produktif dan tidak merusak
- Mengembangkan investasi perikanan tangkap terpadu

Pengembangan konsep minapolitan pada kawasan perikanan memerlukan sekurang-kurangnya tiga langkah, agar minapolitan tersebut dapat berkembang dan menjadi bagian dari program nasional. Langkah pertama penetapan dasar hukum agar minapolitan menjadi program nasional. Langkah kedua adalah penentuan lokasi minapolitan. Langkah ketiga adalah implementasi rancang bangun minapolitan pada kawasan perikanan (Zulham, 2010).

2.3 Implementasi Program

2.3.1 Teori Implementasi Program

Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahan yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola *input* untuk menghasilkan *output* atau *outcomes* bagi masyarakat (Akib dan Tarigan, 2008). Mengutip pendapat para pakar yang menyatakan bahwa proses implementasi kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, tetapi juga menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak negatif maupun positif, dengan demikian dalam mencapai keberhasilan implemetasi, diperlukan kesamaan pandangan tujuan yang hendak dicapai dan komitmen semua pihak untuk memberikan dukungan. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan, dapat diukur dengan melihat kesesuaian antara pelaksanaan atau penerapan kebijakan dengan desain, tujuan dan sasaran kebijakan itu sendiri serta memberikan dampak atau hasil yang positif bagi pemecahan permasalahan yang dihadapi (Setyadi, 2005).

Teori Implementasi menurut Edward (1980), menjelaskan bahwa terdapat empat variable kritis dalam implementasi kebijakan publik atau program diantaranya, komunikasi atau kejelasan informasi dan konsistensi informasi (*communications*), ketersediaan sumberdaya dalam jumlah dan mutu tertentu (*resources*), sikap dan komitmen dari pelaksana program atau kebijakan birokrat (*disposition*), dan struktur birokrasi atau standar operasi yang mengatur tata kerja dan tata laksana (*bureaucratic strucuture*). Variabel-variabel tersebut saling berkaitan satu sama lain untuk mencapai tujuan implementasi kebijakan :

1. Komunikasi (*communications*)

Komunikasi dibutuhkan oleh setiap pelaksana kebijakan untuk mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Bagi suatu organisasi, komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi, ide-ide diantara para anggota organisasi secara timbal balik dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Keberhasilan komunikasi ditentukan oleh 3 (tiga) indikator, yaitu penyaluran komunikasi, konsistensi komunikasi dan kejelasan komunikasi. Faktor komunikasi dianggap penting, karena dalam proses kegiatan yang melibatkan unsur manusia dan unsur sumber daya akan selalu berurusan dengan permasalahan "bagaimana hubungan yang dilakukan".

2. Ketersediaan sumberdaya (*resources*)

Berkenaan dengan sumberdaya pendukung untuk melaksanakan kebijakan yaitu :

a. Sumberdaya manusia : merupakan aktor penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan dan merupakan potensi manusiawi yang melekat keberadaannya pada seseorang meliputi fisik maupun non fisik berupa kemampuan seorang pegawai yang terakumulasi baik dari latar belakang pengalaman, keahlian, keterampilan dan hubungan personal.
b. Informasi : merupakan simberdaya kedua yang penting dalam implementasi kebijakan. Informasi yang disampaikan atau diterima haruslah jelas sehingga dapat mempermudah atau memperlancar pelaksanaan kebijakan atau program.
c. Kewenangan : hak untuk mengambil keputusan, hak untuk mengarahkan pekerjaan orang lain dan hak untuk memberi perintah.
d. Sarana dan prasarana : merupakan alat pendukung dan pelaksana suatu kegiatan. Sarana dan prasaran dapat juga disebut dengan perlengkapan

yang dimiliki oleh organisasi dalam membantu para pekerja di dalam pelaksanaan kegiatan mereka.

e. Pendanaan : membiayai operasional implementasi kebijakan tersebut, informasi yang relevan, dan yang mencukupi tentang bagaimana cara mengimplementasi suatu kebijakan, dan kerelaan atau kesanggupan dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut. Hal ini dimaksud agar para implementator tidak melakukan kesalahan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.

3. Sikap dan komitmen dari pelaksana program (*disposition*)

Berhubungan dengan kesediaan dari para implementor untuk menyelesaikan kebijakan publik tersebut. Kecakapan saja tidak mencukupi tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Disposisi menjaga konsistensi tujuan antara apa yang ditetapkan pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan. Kunci keberhasilan program atau implementasi kebijakan adalah sikap pekerja terhadap penerimaan dan dukungan atas kebijakan atau dukungan yang telah ditetapkan.

4. Struktur birokrasi (*bureaucratic strucuture*)

Berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Struktur birokrasi menjelaskan susunan tugas dan para pelaksana kebijakan, memecahkannya dalam rincian tugas serta menetapkan prosedur standar operasi.

2.3.2 Implementasi Program Minapolitan

Menurut Zulham (2010), berdasarkan hasil penelitian Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Perikanan dan Kelautan (BBRSEPK), implementasi program minapolitan pada berbagai tipologi kelautan dan perikanan tersebut memerlukan

tiga prinsip yaitu : pra-syarat minapolitan, model minapolitan dan road map minapolitan.

1) Pra-syarat minapolitan

Prasyarat minapolitan adalah kondisi minimal yang harus dipenuhi pada suatu kawasan agar program minapolitan tersebut dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Prasyarat minapolitan tersebut terdiri dari :

a. Kawasan minapolitan tersebut tidak terisolasi
b. Pemerintah daerah setempat memberi dukungan terhadap program minapolitan
c. Memiliki potensi sumberdaya yang mencukupi
d. Pendekatan dalam pengembangan komoditas perikanan berorientasi pada "*market driven*" bukan berdasarkan "*supply driven*"

2) Model minapolitan

Ada tiga tahapan dalam membangun model minapolitan yaitu model eksisting, model konseptual dan model potensial serta model praktikal minapolitan

a. Model eksisting, adalah rancangan model kajian minapolitan pada kawasan minapolitan yang dikembangkan oleh berbagai eselon 1 pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada model ini pemerintah mengintervensi perekonomian kawasan dalam aspek *hard and soft infrastructure.* Model eksisting kajian minapolitan dapat dilihat pada gambar 1 :

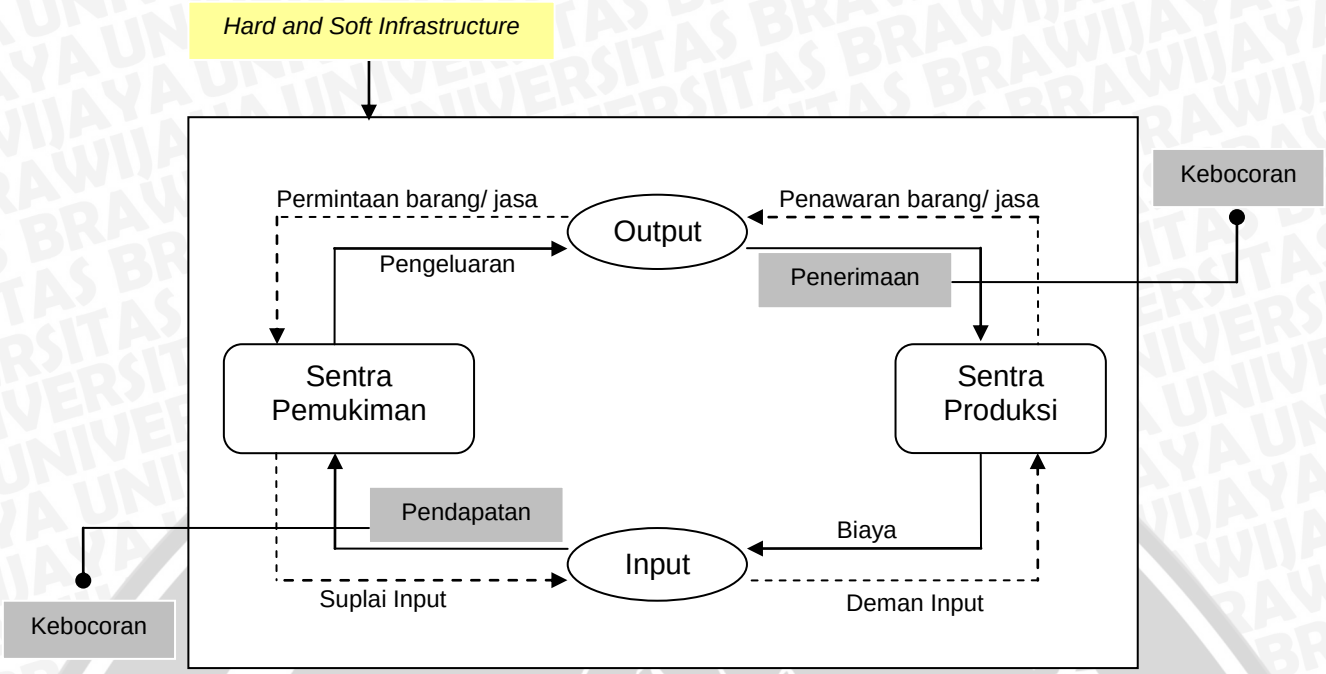

Gambar 1. Model eksisting minapolitan

b. Model konseptual dan potensial kajian minapolitan. Model eksisting kajian minapolitan yang dilengkapi dengan enam pilar minapolitan disebut sebagai model konseptual minapolitan. Model konseptual minapolitan adalah model yang dibangun pada kawasan minapolitan yang menjadi fokus untuk dipelajari dengan memperhatikan tujuan minapolitan. Sedangkan model potensial kajian minapolitan adalah model yang dibangun pada kawasan potensial pengembangan perikanan tetapi belum termasuk sebagai kawasan minapolitan yang ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, kawasan ini mempunyai sumberdaya yang cukup dan akses pasar yang baik. Model konseptual dan potensial kajian minapolitan dapat dilihat pada gambar 2.

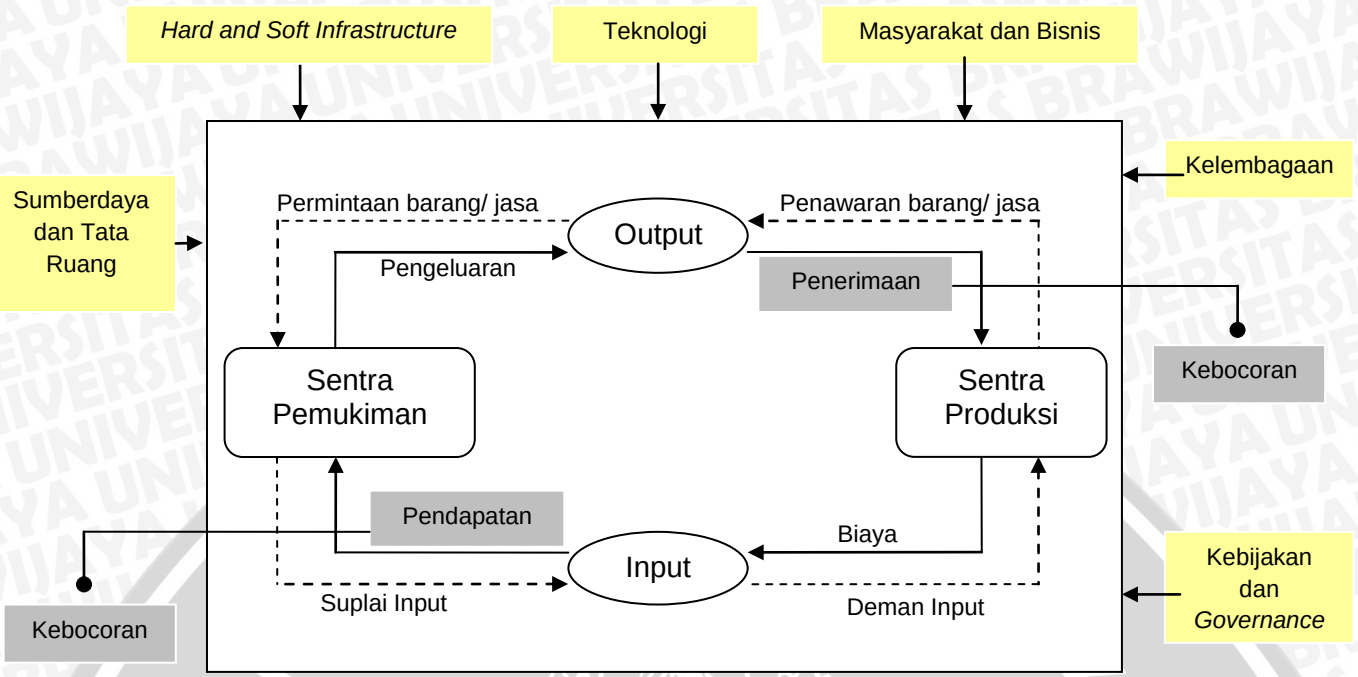

Gambar 2. Model konseptual dan potensial kajian minapolitan

c. Model praktikal minapolitan, merupakan hasil komparasi antara model konseptual/ model potensial dengan kondisi dilapangan (model eksisting). Komparasi ini akan menghasilkan *lesson learned* tentang kinerja program minapoitan pada lokasi penelitian berdasarkan variabel-variabel dari setiap pilar minapolitan. *Lesson learned* ini menjadi dasar untuk mengkoreksi model minapolitan yang telah ada, sehingga diperoleh model praktikal minapolitan yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Pada kawasan yang tidak ditetapkan sebagai kawasan minapolitan, maka harus dilakukan assesmen terhadap model potensial kajian minapolitan terhadap kondisi spesifik lokasi penelitian. Assesmen ini menghasilkan pengetahuan spesifik lokasi yang menjadi dasar untuk mengkoreksi model potensial kajian agar menjadi model praktikal minapolitan. Kerangka pendekatan menuju implementasi model minapolitan dapat dipelajari pada gambar 3 :

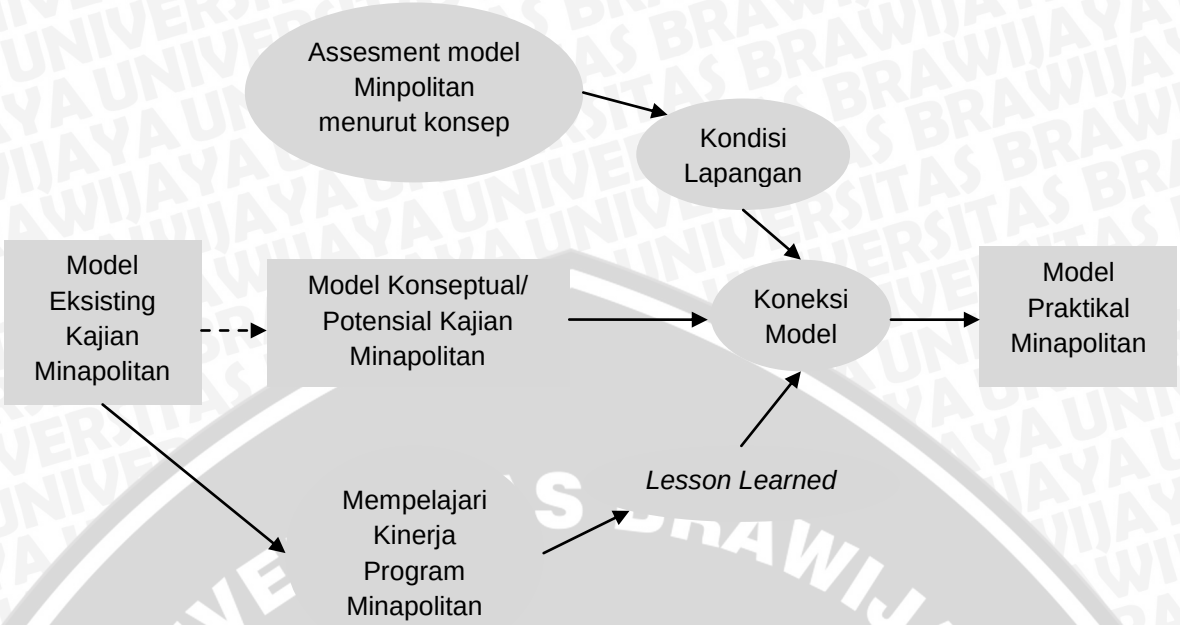

Gambar 3. Kerangka implementasi model praktikal minapolitan

3) *Road Map* Minapolitan

Model praktikal minapolitan yang dirumuskan harus dijabarkan dalam suatu *road map* minapolitan yang dapat memberi acuan dalam pelaksanaan program minapolitan. *Road map* tersebut sekurang-kurangnya memberikan acuan tentang tujuan dari program minapolitan tersebut (seperti peningkatan produksi dan kesejahteraan). Target peningkatan produksi per tahun, indikator kinerja tahunan dari program minapolitan, serta tahapan pelaksanaan program minapolitan pada suatu kawasan.

2.4 Pengembangan Kawasan Minapolitan

Program pengembangan kawasan minapolitan adalah pembangunan ekonomi berbasis perikanan yang dilaksanakan dengan jalan mensinergikan berbagai potensi yang ada, utuh dan menyeluruh, berdaya saing, berbasis kerakyatan, berkelanjutan dan terdesentralisasi yang digerakkan oleh masyarakat dan fasilitas oleh pemerintah (Pemda Kab. Lamongan, 2011).

2.4.1 Persyaratan Kawasan Minapolitan

Suatu kawasan dapat ditetapkan sebagai kawasan Minapolitan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Kesesuaian dengan Rencana Strategis, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan/atau Rencana Zonasi Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) kabupaten/kota, serta Rencana Pengembangan Investasi Jangka Menengah Daerah (RPIJMD) yang telah ditetapkan :
2. Memiliki komoditas unggulan dibidang kelautan dan perikanan dengan nilai ekonomi tinggi
3. Letak geografi kawasan yang strategis dan secara alami memenuhi persyaratan untuk pengembangan produk unggulan kelautan dan perikanan
4. Terdapat unit produksi, pengolahan dan/atau pemasaran dan jaringan usaha yang aktif berproduksi,mengolah dan/atau memasarkan yang terkonsentrasi disuatu lokasi dan mempunyai mata rantai produksi pengolahan dan/atau pemasaran yang saling terkait
5. Tersedia fasilitas pendukung berupa aksesibilitas terhadap pasar, permodalan, saran dan prasarana produksi, pengolahan dan/atau pemasaran, keberadaan lembaga-lembaga usaha, dan fasilitas penyuluhan dan pelatihan
6. Kelayakan lingkungan diukur berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, potensi dampak negatif, dan potensi terjadinya kerusakan di lokasi di masa depan
7. Komitmen daerah, berupa kontribusi pembiayaan, personil dan fasilitas pengelolaan dan pengembangan Minapolitan
8. Keberadaan kelembagaan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang kelautan dan perikanan
9. Ketersediaan data dan informasi tentang kondisi dan potensi kawasan

2.4.2 Tata Laksana Pengembangan Kawasan Minapolitan

Sebagai kawasan ekonomi unggulan, kawasan minapolitan dirancang dan dikembangkan secara terintegrasi dengan paket-paket kebijakan lintas sektor dan daerah. Secara umum tata laksana pengembangan kawasan minapolitan mengikuti tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, dan pelaporan.

1. Perencanaan

   Perencanaan pengembangan kawasan minapolitan dilakukan berdasarkan persyaratan kawasan minapolitan dengan prosedur sebagai berikut :

   a. Identifikasi keberadaan sentra produksi yang produktif dan mempunyai potensi untuk dikembangkan lebih lanjut melalui studi kelayakan
   b. Penetapan kawasan minapolitan dengan keputusan bupati/walikota
   c. Penyusunan rencana induk pengembangan kawasan minapolitan yang didalamnya mencakup rencana pengusahaan dan rencana tindak
   d. Pengajuan rencana induk kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Pekerjaan Umum, tembusan kepada Gubernur dan Kementerian Dalam Negeri
   e. Proses perencanaan melibatkan para pihak yang terkait, yaitu unsur-unsur pemerintahan, masyarakat, dunia usaha dan perguruan tinggi

2. Pelaksanaan

   Pelaksanaan pengembangan kawasan minapolitan dilakukan setelah ada kesepakatan antara Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan daerah yang bersangkutan dengan pertimbangan sebagai berikut :

   a. Pengembangan kawasan minapolitan merupakan fase lanjutan dari proses pembinaan dan pengembangan sentra produksi kelautan dan perikanan yang sedang berjalan

b. Pelaksanaan pengembangan kawasan minapolitan dilakukan oleh daerah yang bersangkutan dan didukung oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Pekerjaan Umum dengan paket-paket kebijakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

c. Pelaksanaan pengembangan kawasan minapolitan dilakukan sesuai dengan rencana induk dan kesepakatan antara pihak terkait pada fase perencanaan

d. Perubahan rencana induk pada fase pelaksanaan dilakukan dengan persetujuan para pihak yang bersepakat sesuai perencanaan

e. Penyiapan kelembagaan, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana produksi, anggaran yang dapat bersumber dari APBD, APBN dan DAK sesuai dengan kesepakatan para pihak terkait

f. Penyiapan paket-paket pendampingan dan bantuan teknis, seperti paket pelatihan, penyuluhan dan teknologi oleh para pihak sesuai dengan kewenangannya

3. Monitoring dan Evaluasi

4. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui kesesuaian, efektivitas dan efisiensi kegiatan antara perencanaan dan pelaksanaan, serta keberhasilan kegiatan dengan indikator masukan, proses, keluaran, dan hasil

5. Monitoring dan evaluasi dilakukan setiap 3 bulan oleh bupati/walikota

4. Pelaporan

a. Pelaporan dilakukan secara berjenjang dari bupati/walikota kepada gubernur untuk selanjutnya gubernur menyampaikan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, menteri/ pimpinan LPNK dan dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

b. Hasil analisis laporan disampaikan kepada bupati/walikota oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

2.4.3 Kelembagaan Minapolitan

Menurut KKP (2011), sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 18 tentang Pedoman Umum Minapolitan secara umum kelembagaan Minapolitan di tingkat kabupaten/kota adalah sebagai berikut :

1. Penanggung jawab : Bupati/ Walikota
2. Ketua : Sekretaris Daerah
3. Sekretaris : Kepala Dinas kelautan dan Perikanan
4. Bidang Perencanaan : Kepala Bappeda
5. Bidang Pemberdayaan/Pelaksanaan : Kepala Pelabuhan Perikanan (perikanan tangkap) atau pihak lain yang mempunyai kompetensi (budidaya atau pengolahan)
6. Bidang Monitoring dan Evaluasi : Pejabat yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang monitoring dan evaluasi atau pejabat lain yang ditunjuk
7. Anggota : Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait

2.5 Partisipasi Masyarakat

Arimbi (1993) *dalam* Bahagia (2009), mendefinisikan peran serta masyarakat sebagai suatu cara melakukan interaksi antara dua kelompok atau sebagai proses di mana masalah-masalah dan kebutuhan lingkungan sedang dianalisa oleh badan yang bertanggung jawab. Secara sederhana didefinisikannya sebagai *feed forward information* (komunikasi dari Pemerintah kepada masyarakat tentang suatu kebijakan) dan *feed back information* (komunikasi dari masyarakat ke Pemerintah atas kebijakan). Partisipasi rakyat dalam pembangunan bukanlah mobilisasi rakyat dalam pembangunan.

Partisipasi rakyat dalam pembangunan adalah kerja sama antara rakyat dan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan dan membiayai pembangunan.

Sagrim (1997) *dalam* Bahagia (2009), menyatakan bahwa ada 9 (sembilan) tipe partisipasi yang dapat terjadi dalam pembangunan di daerah. Kesembilan tipe partisipasi itu adalah sebagai berikut :

a. Partisipasi tipe sukarela dengan inisiatif dari bawah.

b. Partisipasi dengan imbalan yang inisiatifnya datang dari bawah.

c. Partisipasi desakan atau paksaan (*enforced*) dengan inisiatif dari bawah.

d. Partisipasi sukarela (*volutered*) dengan inisiatif dari atas.

e. Partisipasi imbalan (*rewaded*) dengan inisiatif dari atas.

f. Partisipasi paksaan dengan inisiatif dari atas.

g. Partisipasi sukarela dengan inisiatif bersama (*through shared initiative*).

h. Partisipasi imbalan dengan inisiatif bersama, dan

i. Partisipasi paksaan dengan inisiatif bersama (dari atas dan dari bawah).

Pilihan kebijakan ekonomi daerah merupakan langkah strategis untuk menciptakan keadilan ekonomi dan politik serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Partisipasi yang dimaksud terutama berkaitan dengan perencanaan pembangunan sektor kelautan dan perikanan di daerah. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dilandasi oleh : pertama, partisipasi masyarakat pesisir khususnya nelayan dan petani ikan merupakan instrumen untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat. Kedua, masyarakat pesisir akan lebih mempercayai program yang dikembangkan dalam bidang yang terkait langsung dengan kepentingan mereka. Keterlibatan mereka dalam proses persiapan dan perencanaan sampai implementasi membuat mereka mengetahui seluk-beluk program tersebut dan bahkan merasa memilikinya. Ketiga, hal ini akan mendorong terciptanya partisipasi secara umum (*common participation*)

masyarakat pesisir dalam pembangunan karena tercipta persepsi yang kondusif bahwa partisipasi mereka merupakan “hak demokrasi” untuk menunjang proses pembangunan itu sendiri (Kusumastanto, 2003).

2.6 Faktor Penghambat dan Pendukung Program

Faktor penghambat dan pendukung pada implementasi kebijakan menurut Wood dan Gun (1975) yaitu :

1. Faktor penghambat, antara lain :
   a. Hambatan politik, ekonomi dan lingkungan
   b. Kelemahan institusi
   c. Ketidakmampuan sumberdaya manusia di bidang teknis maupun administrasi
   d. Kekurangan dalam bantuan teknis
   e. Kurangnya desentralisasi dan partisipasi
   f. Sistem informasi yang kurang mendukung
   g. Perbedaan agenda dan tujuan antara aktor
   h. Dukungan yang berkesinambungan
2. Faktor pendukung, antara lain :
   a. Anggota masyarakat merespon terhadap otoritas-otoritas dan keputusan-keputusan badan pemerintah
   b. Kesadaran untuk menerima kebijakan yang dibuat pemerintah
   c. Keyakinan bahwa kebijakan itu memberikan dampak positif dalam menyelesaikan permasalahan penting masyarakat

2.7 Hasil Penelitian Terdahulu

Minapolitan merupakan konsep pembangunan wilayah yang memanfaatkan keunggulan wilayah. Keunggulan tersebut dapat berupa keunggulan lokasi dan komoditas. Berdasarkan hasil penelitian Balai Besar Riset

Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBRSEKP) pada kawasan minapolitan di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bitung, persepsi pemerintah daerah terhadap minapolitan cenderung diarahkan untuk membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan lainnya. Minapolitan dianggap merupakan proyek pembangunan pemerintah pusat. Tujuan utama minapolitan adalah untuk meningkatkan produksi perikanan. Dengan demikian untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan rekayasa kelembagaan dalam mengakselerasi semua pilar minapolitan yang ada pada kawasan tersebut. Jika persepsi pengembangan minapolitan diarahkan pada salah satu pilar yang disebutkan sebelumnya, akan menyebabkan tidak terjadinya akselerasi peningkatan produksi perikanan (Zulham dkk, 2010).

Penerapan kebijakan minapolitan memerlukan strategi untuk melaksanakannya. Komponen-komponen pembangun minapolitan harus diidentifikasi dan diketahui bagaimana perannya pada kawasan tersebut. Jika inti minapolitan tersebut perannya dipercaya kepada pihak luar, maka pada kawasan minapolitan tersebut akan terjadi persaingan yang tdak sehat antara pihak luar dengan komponen-komponen yang telah ada dalam kawasan minapolitan. Hal yang perlu mendapat perhatian adalah pihak luar tersebut umumnya masuk ke kawasan minapolitan karena difasilitasi oleh pemerintah. Pemerintah memfasilitasi mereka karena pihak luar tersebut mempunyai modal yang kuat, dengan harapan kehadiran mereka dapat berkontribusi untuk membangkitkan ekonomi pada kawasan minapolitan.

Berdasarkan hasil penelitian BBRSEKP di PPN Ratu, pengamatan lapangan menunjukkan komponen-komponen yang berperan dalam membangun minapolitan berasal dari dalam kawasan minapolitan mempunyai banyak keterbatasan terkait dengan kemampuan teknis dan manajemen pengelolaan usaha. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan kapasitas komponen-komponen

tersebut diperlukan pendampingan teknis dan manajemen agar kapasitas dari komponen pembangunan minapolitan tersebut dapat meningkat seiring dengan berkembangnya perekonomian di kawasan minapolitan (Zulham dan Wardono, 2010).

Lebih lanjut Zulham dan Wardono (2010) menjelaskan, komponen – komponen yang berasal dari kawasan minapolitan harus berfungsi sebagai mitra strategis dari komponen yang berada dalam kawasan minapolitan. Mitra strategis tersebut dapat berperan sebagai penyuplai berbagai keperluan minapolitan melalui komponen-komponen lokal minapolitan, dan sebagai distributor hasil produksi yang dihasilkan kawasan minapolitan dengan mengikutsertakan komponen lokal. Membangun mitra strategis antara komponen lokal dengan komponen lain diluar kawasan minapolitan adalah sangat sulit, karena itu diperlukan suatu pendekatan yang berkesinambungan agar terbentuk kepercayaan dan saling membutuhkan dalam kegiatan mereka dalam perekonomian.

2.8 Analisis IPA (*Importance Performance Analysis*)

Metoda *Importance Performance Analysis* (IPA) pertama kali diperkenalkan oleh Martilla dan James (1997) dengan tujuan untuk mengukur kepuasan pelanggan dalam produk atau servisnya. Pendekatan IPA adalah untuk mengenali kepuasan sebagai fungsi dari : seberapa penting sebuah produk atau jasa buat konsumen dan performa bisnis atau bahan dalam penyediaan jasa atau produk (Martilla dan James (1997) dalam Irianto, 2011).

Dalam hal ini IPA tidak hanya menguji performa dari sebuah item tapi juga kepentingan item tersebut sebagai faktor yang menentukan dalam kepuasan pelanggan. Dengan kata lain IPA menampilkan informasi berkaitan dengan faktor-faktor pelayanan yang menurut konsumen sangat mempengaruhi

kepuasan dan loyalitas mereka, dan faktor-faktor pelayanan yang menurut konsumen perlu ditingkatkan karena kondisi sekarang yang belum memuaskan. Berikut untuk masing-masing penjelasan kuadran (Brandt (2000) dalam Irianto, 2011) ;

Importance - Perrformance

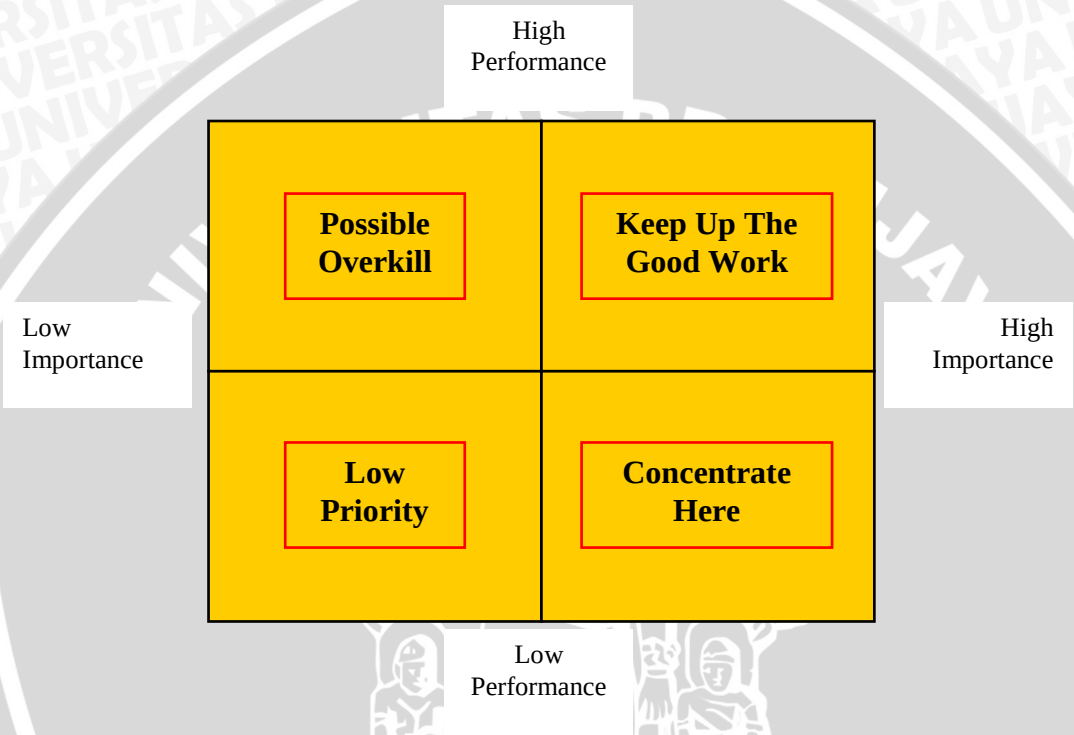

Gambar 4. Pembagian Kuadran *Importance Performance Analysis*

1. Kuadran pertama : pertahankan kinerja (*high importance & high performance*). Dianggap sebagai faktor penunjang bagi kepuasan konsumen sehingga manajemen wajib memastikan kinerja institusinya dapat mempertahankan prestasi yang telah dicapai.
2. Kuadran kedua : cenderung berlebihan (*low importance & high performance*). Dianggap tidak terlalu penting sehingga manajemen bisa mengalaokasikan

sumberdaya yang terkait dengan faktor-faktor tersebut kepada faktor-faktor lain yang lebih membutuhkan peningkatan penanganan.

3. Kuadran ketiga : prioritas rendah (low importance & low performance). Dianggap mempunyai tingkat kepuasan yang rendah sekaligus dianggap tidak terlalu penting oleh konsumen, sehingga manajemen tidak perlu memprioritaskan faktor tersebut.
4. Kuadran keempat : tingkatkan kinerja (*high importance & low performance*). Dianggap faktor yang sangat penting namun belum memuaskan untuk kondisi saat ini sehingga harus menjadi perhatian bagi manajemen untuk mengalokasikan sumberdaya yang memadai.

Mulanya metode ini digunakan dalam jasa pelayanan kesehatan dan institusi keuangan (Bruyere, Rodriguez & Vaske (2002) dalam Irianto, 2011). Metode ini telah terbukti dalam berbagai alpikasi yang relatif mudah dalam administrasi dan interpretasinya yang banyak digunakan oleh peneliti dan manajer dalam banyak bidang. IPA menggabungkan pengukuran faktor tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan dalam grafik dan dimensi yang memudahkan penjelasan data dan mendapatkan usulan praktis

3. METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat peneliti dapat menangkap keadaan yang sebenarnya dari obyek yang diteliti. Untuk menentukan lokasi penelitian terdapat beberapa faktor yang harus dipertimbangkan oleh peneliti. Keterbatasan geografis dan praktis seperti waktu, biaya, tenaga, perlu juga dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian.

Lokasi penelitian berada di kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong, yang terletak di Desa Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan. Lokasi ini dipilih karena kawasan PPN Brondong merupakan salah satu kawasan yang dianggap memenuhi syarat untuk Program Pengembangan Kawasan Minapolitan dan melalui Keputusan Menteri nomor 39 tahun 2011 telah ditetapkan sebagai kawasan program minapolitan berbasis perikanan tangkap. Dengan salah satu konsepsinya adalah menjadikan PPN Brondong sebagai *Mall* Perikanan.

3.2 Metode Penelitian

Menurut Mikkelsen (2003), metode-metode penelitian didefinisikan sebagai alat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tertentu dan menyelesaikan masalah ilmu ataupun praktis, sehingga pokok masalahnya adalah pertanyaan yang harus dijawab itulah yang harus menjadi pedoman pemilihan metode dan metode-metode seyogyanya tidak kaku.

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian survei yang bersifat deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode yang menggambarkan keadaan atau kejadian-kejadian pada suatu daerah tertentu. Dalam metode ini pengambilan data dilakukan tidak hanya terbatas pada pengumpulan dan penyusunan data,

tapi meliputi analisis dan pembahasan tentang data tersebut. Metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara umum, sistematis, aktual dan valid mengenai fakta dan sifat-sifat populasi daerah tersebut (Suryabrata,1994)

3.3 Teknik Pengambilan Data Penelitian

3.3.1 Data Primer

Data primer yang dimaksud adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer dapat berupa opini subyek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda atau kegiatan, dan hasil pengujian (Indriantoro dan Supomo, 2002). Data primer didapatkan dari :

a. Observasi

Menurut Nazir (2005), observasi merupakan pengumpulan data dengan pengamatan langsung yang dilaksanakan terhadap subyek sebagaimana adanya di lapangan atau dalam suatu percobaan baik di lapangan atau di dalam laboratorium. Metode observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan mengamati lokasi lapangan secara langsung dan aktivitas para masyarakat pesisir di PPN Brondong.

b. Wawancara

Menurut Suhartono (2008), wawancara (*interview*) adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada responden dan jawaban-jawaban respoden dicatat atau direkam dengan alat perekam (tape recorder). Wawancara akan dilakukan terhadap salah satu pegawai di Dinas Kelautan dan Perikanan / Kantor PPN Kabupaten Brondong Jawa Timur.

c. Daftar Pertanyaan (Kuisioner)

Data dan informasi yang diperlukan dikumpulkan dari sumbernya dengan menggunakan instrumen yang telah disiapkan terlebih dulu, instrumen yang dimaksud berbentuk kuisioner (daftar isian) dan daftar pertanyaan (depth interview) (PT.Setia Guna Darma, 2006).

Data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan responden (pegawai pemerintah / nelayan/ pedagang) dengan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu sesuai dengan tujuan dan kebutuhan penelitian. Karakteristik responden dapat dilihat pada lampiran 5. Data primer diperoleh dari pegawai pemerintah dan masyarakat wilayah pesisir setempat (nelayan/ pedagang). Data dan informasi tersebut diperoleh langsung dari lapangan di lokasi yang telah ditentukan sebelumnya.

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan peneliti terdahulu. Data sekunder disebut juga data tersedia (Hasan, 2002).

Studi pustaka dilakukan untuk menentukan pendekatan teoritik termasuk pengumpulan data sekunder yang sesuai dengan permasalahan penelitian (Nazir, 1983). Studi pustaka ini untuk memberikan informasi yang lebih banyak tentang kejadian-kejadian yang tidak terekam di lapang sebagai analisa dan pengungkapan fakta.

3.4 Metode *Sampling*

Hal-hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan metode *sampling* ialah:

a. Variabel

Variabel adalah suatu konsep tentang atribut ataupun sifat yang terdapat pada subjek penelitian yang beraneka ragam secara kuantitatif maupun kualitatif. Variabel tunggal pada studi ini yaitu X = Efektivitas program pengembangan kawasan minapolitan

b. Populasi

Populasi adalah sejumlah individu yang akan dikenai generalisasi hasil penelitian, minimal mempunyai satu karakteristik yang sama. Penelitian ini mengambil dua karakteristik yaitu pegawai PPN Brondong / pegawai DKP Lamongan yang telah mengetahui semua program pengembangan kawasan minapolitan selaku pelaksana kegiatan dan masyarakat pesisir khususnya nelayan dan pedagang selaku penerima program kegiatan atau pengguna fasilitas.

c. Sampel

Sampel adalah bagian populasi yang langsung dikenai penelitian. Pengambilan Sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sampel wilayah atau *area probability sample*. Sampel wilayah adalah teknik sampling yang dilakukan dengan mengambil wakil dari setiap wilayah yang terdapat dalam populasi.

Pertama-tama dibuat angket atau bisa disebut kuisioner tentang Kepuasan Kinerja program pengembangan kawasan minapolitan. Ada pun angket kepuasan Kinerja program pengembangan kawasan minapolitan dalam penelitian ini disusun berdasarkan Bergh and Davics (1999) ditambahkan beberapa aspek kepuasan kinerja program pengembangan kawasan minapolitan yang relevan dengan keadaan penelitian yang terdiri dari 6 kegiatan minapolitan dan 8 kegiatan penunjang program minapolitan untuk mengetahui tingkat kepuasan dan tingkat kepentingan pelaksanaan program minapolitan antara lain:

1. Implementasi Kegiatan Minapolitan
   - ✓ Pembangunan Infrastruktur
     - Pembangunan Breakwater
     - Pavingstone jalan pesisir Kecamatan Paciran
     - Perencanaan, pengawasan da pemborongan jalan komplek
   - ✓ Kegiatan Perikanan
     - Pengadaan rumpon dasar/apartemen ikan (5 unit)
     - Pembinaan pengembangan usaha perikanan (pembinaan KUB perikanan tangkap)
     - Pengadaan timbangan ikan
2. Kegiatan Penunjang Program Minapolitan
   - ✓ Pembangunan Infrastruktur
     - Rehabilitasi breakwater
     - Pembangunan kantor POKMASWAS
     - Pemborongan pengadaan instalasi listrik
   - ✓ Kegiatan Perikanan
     - Pengadaan alat tangkap perikanan (bubu)
     - Pengadaan payang teri
     - Review MASTERPLAN
     - Pengadaan peralatan pendukung PPDI (paket 1)
     - Pengadaan peralatan pendukung PPDI (paket 2)

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

3.5 Alur Penelitian

Alur penelitian dapat digambarkan seperti pada Gambar 4 di bawah ini.

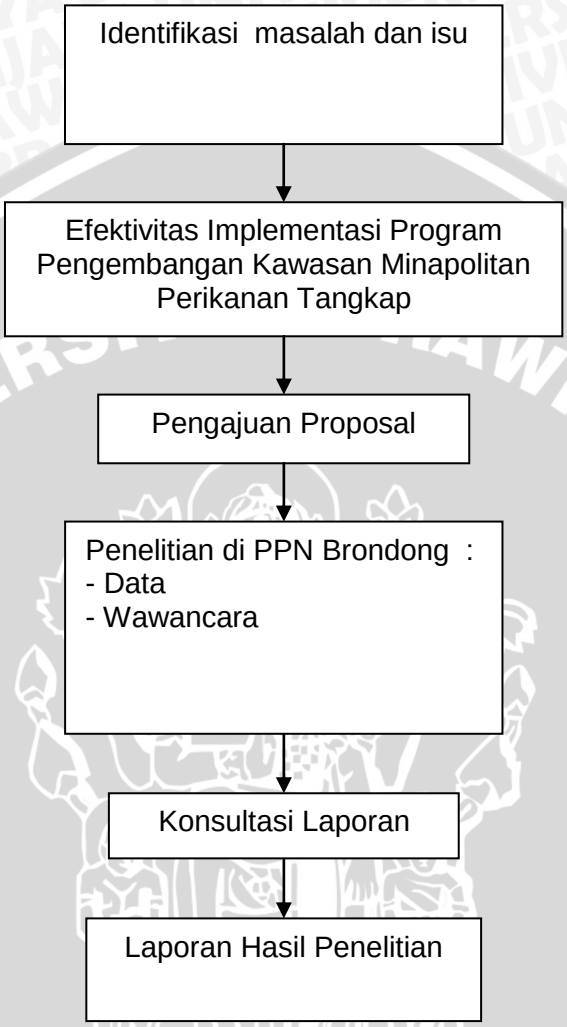

Gambar 5. Alur Penelitian

3.6 Metode Analisa Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif dan analisis evaluatif.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

3.5.1 Analisis Deskriptif

Menurut Sugiyono (2008), analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimanan adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalsasi. Tolak ukur pendeskripsian ini adalah dengan pemberian angka, baik dalam jumlah maupun prosentase.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptof persentase. Deskriptif presentase ini diolah dengan cara frekuensi yang menjawab “ya” atau “tidak” dibagi dengan jumlah responden dikali 100%, seperti yang dikemukakan Sudjanan (2001) adalah sebagai berikut :

$$P = \frac{F}{N} X\ 100\% \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots(1)$$

Keterangan :

P = Persentase responden yang menjawab “ya” atau “tidak”

F = Jumlah rssponden yang menjawab “ya” atau “tidak”

N = Jumlah responden

3.5.2 Analisis Evaluatif

Analisis evaluatif merupakan analisis yang diterapkan melalui studi pustaka yang dibandingkan dengan studi di lapangan. Studi pustaka berasal dari sumber tertulis seperti jurnal, dokumen, laporan dan peraturan. Sedangkan studi di lapangan dilakukan dengan cara observasi lapangan, wawancara dan diskusi dalam suatu kelompok maupun perseorangan.

Analisis evaluatif yang digunakan yaitu metode analisis Important Performance Analyst (IPA) untuk mengetahui efektivitas dari implementasi

kegiatan pengembangan kawasan minapolitan. Variabel yang digunakan terdapat 14 yaitu:

1. Implementasi Kegiatan Minapolitan
   - ✓ Pembangunan Infrastruktur
     a. Pembangunan Breakwater
     b. Pavingstone jalan pesisir Kecamatan Paciran
     c. Perencanaan, pengawasan da pemborongan jalan komplek
   - ✓ Kegiatan Perikanan
     a. Pengadaan rumpon dasar/apartemen ikan (5 unit)
     b. Pembinaan pengembangan usaha perikanan (pembinaan KUB perikanan tangkap)
     c. Pengadaan timbangan ikan
2. Kegiatan Penunjang Program Minapolitan
   - ✓ Pembangunan Infrastruktur
     a. Rehabilitasi breakwater
     b. Pembangunan kantor POKMASWAS
     c. Pemborongan pengadaan instalasi listrik
   - ✓ Kegiatan Perikanan
     a. Pengadaan alat tangkap perikanan (bubu)
     b. Pengadaan payang teri
     c. Review MASTERPLAN
     d. Pengadaan peralatan pendukung PPDI (paket 1)
     e. Pengadaan peralatan pendukung PPDI (paket 2)

Rumus yang digunakan untuk mengukur tingkat kesesuaian sistem adalah:

$$TKi = \frac{X_i}{Y_i} \times 100\% \quad \text{.....} \quad (2)$$

Dimana:

Tki = tingkat kesesuaian responden

Xi = skor penilaian kinerja instrument Minapolitan

Yi = Skor penilaian kepentingan instrument Minapolitan

Analisis tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan ini menurut Sumarwan (2002) diukur dengan menggunakan skala likert dengan menyusun kategori tingkat kepentingan menjadi sangat penting, tidak penting, dan sangat tidak penting. Sedangkan tingkat kepuasaan dikategorikan menjadi sangat puas, puas, tidak puas dan sangat tidak puas. Skor/nilai ditunjukkan pada Tabel .

Tabel 1 . Bobot antara Kepentingan dan Kinerja

Bobot	Kepentingan (Y)	Kinerja (X)
1	Tidak penting	Tidak puas
2	Kurang penting	Kurang puas
3	Penting	Puas
4	Sangat penting	Sangat puas

Hasil perhitungan digambarkan dalam diagram cartesius yang masing-masing atribut diposisikan berdasarkan bobot rata-rata, dimana bobot rata-rata penilaian kinerja (X) menunjukkan posisi suatu atribut pada sumbu X, sedangkan posisi atribut pada sumbu Y ditunjukkan oleh bobot rata-rata tingkat kepentingan responden (Y). Rumus yang digunakan adalah

$$\overline{X} = \frac{\Sigma X_i}{\Sigma n} \quad .....(3) \qquad \overline{Y} = \frac{\Sigma Y_i}{\Sigma n} \quad .....(4)$$

Dimana :

X = skor rata-rata tingkat kinerja

Y = skor rata-rata tingkat kepentingan

n = jumlah responden

Tingkat kesesuaian adalah hasil perbandingan bobot kinerja dengan bobot kepentingan. Penggunaan diagram cartesius sangat diperlukan dalam penjabaran unsur-unsur tingkat kepentingan dan kepuasan, dilakukan melalui suatu bagan yang dibagi menjadi empat bagian dan dibatasi oleh garis (X,Y) yang diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$X = \frac{\Sigma \overline{x}}{K} \quad .....(5) \qquad\qquad Y = \frac{\Sigma \overline{Y}}{K} \quad .....(6)$$

Dimana:

X = batas sumbu X (tingkat kinerja)

Y = batas sumbu Y (tingkat kepentingan)

K = banyaknya atribut yang mempengaruhi efektivitas

Diagram *Importance Performance Analysis* (IPA) disajikan dalam Gambar 6.

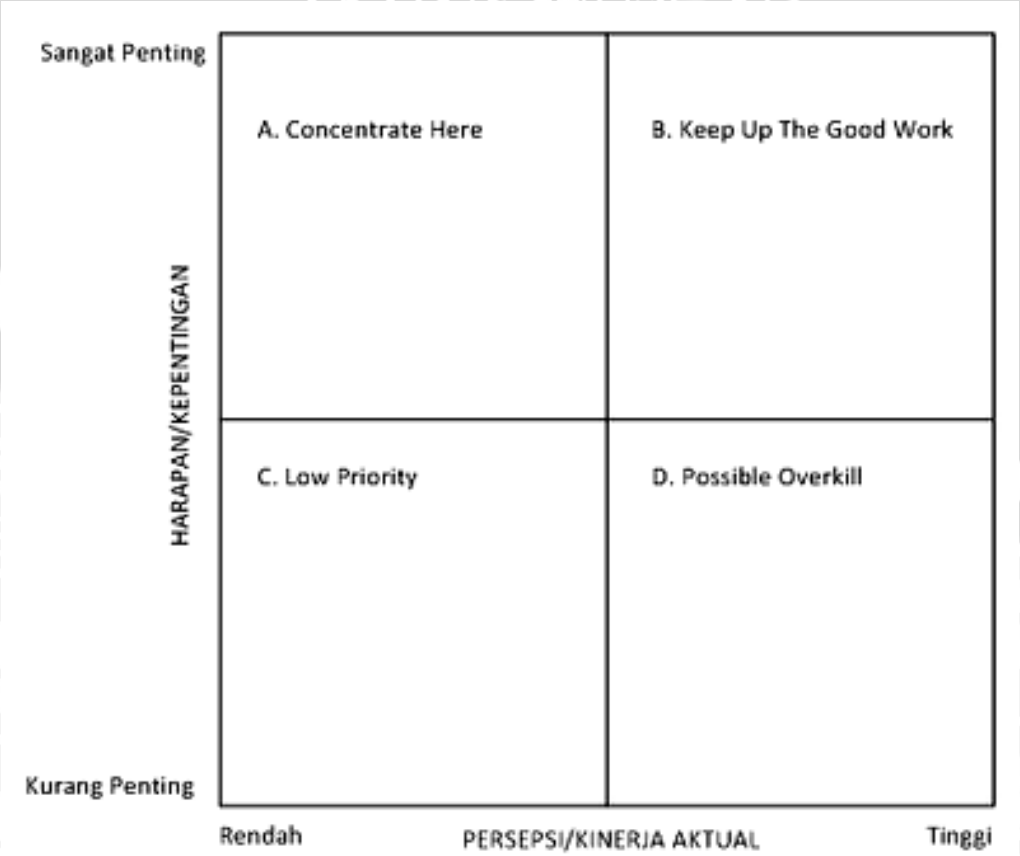

Gambar 6. Diagram IPA (Sumber: Supranto 2006)

Diagram *Importance Performance Analysis* (IPA) dihasilkan dari perhitungan tingkat kepuasan dan kepentingan sebagai berikut :

Kuadran I **Concentrate Here (Konsentrasi di sini)**, Prioritas Utama : Faktor-faktor yang terletak dalam kuadran ini dianggap sebagai faktor yang Penting dan atau Diharapkan oleh responden tetapi kinerja yang ada pada saat ini belum memuaskan sehingga pemerintah berkewajiban meningkatkan kinerja faktor tersebut. Faktor-faktor yang terletak pada kuadran ini merupakan prioritas untuk ditingkatkan.

Kuadran II **Keep up with the good work** (Pertahankan prestasi) : Memuat atribut yang dianggap penting oleh responden dan telah sesuai dengan harapan

Kuadran III **Low Priority** (Prioritas Rendah) : Faktor-faktor yang terletak pada kuadran ini mempunyai tingkat kinerja yang rendah sekaligus dianggap tidak terlalu penting atau tidak terlalu diharapkan oleh konsumen sehingga tidak perlu memprioritaskan atau terlalu memberikan perhatian pada faktor-faktor tersebut.

Kuadran IV **Possibly Overkill** (Terlalu Berlebihan) : Faktor-faktor yang terletak pada kuadran ini dianggap tidak terlalu penting dan atau tidak terlalu diharapkan sehingga perlu mengalokasikan sumber daya yang terkait dengan faktor-faktor tersebut kepada faktor-faktor lain yang mempunyai prioritas penanganan lebih tinggi yang masih membutuhkan peningkatan, semisal di kuadran II.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Kondisi Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Lamongan

4.1.1.1 Letak Geografis

Secara geografis Kabupaten Lamongan terletak pada 6° 51' 54" sampai dengan 7° 23' 6" Lintang Selatan dan diantara garis Bujur Timur 122° 4' 4" sampai 122° 33' 12". Kabupaten Lamongan memiliki luas wilayah ± 1.812,8 km^2 atau ± 3,78 % dari luas wilayah Propinsi Jawa Timur. Dengan panjang garis pantai 47 km, maka wilayah perairan laut Kabupaten Lamongan adalah seluas 902,4 km^2, apabila dihitung 12 mil dari permukaan laut. Secara administrasi wilayah Kabupaten Lamongan memiliki batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Laut Jawa

Sebelah timur : Kabupaten Gresik

Sebelah Selatan : Kabupaten Jombang dan Mojokerto

Sebelah Barat : Kabupaten Bojonegoro dan Tuban

Wilayah Kabupaten Lamongan terdiri atas 27 kecamatan dengan jumlah desa/ kelurahan sebanyak 474 desa/ kelurahan (426 desa dan 12 kelurahan). Adapun kecamatan-kecamatan yang ada di dalam wilayah Kabupaten Lamongan meliputi Kecamatan Sukorame, Bluluk, Ngimbang, Sambeng, Mantup, Kembangbahu, Sugio, Kedungpring, Modo, Babat, Pucuk, Sukodadi, Lamongan, Tikung, Sarirejo, Deket, Glagah, Karangbinangun, Turi, Kalitengah, Karanggeneng, Sekaran, Maduran, Laren, Solokuro, Paciran dan Brondong. Peta Kabupaten Lamongan dapat dilihat pada lampiran 1.

4.1.1.2 Keadaan Topografi

Kondisi topografi Kabupaten Lamongan dapat ditinjau dari ketinggian wilayah diatas permukaan laut dan kelerengan lahan. Kabupaten Lamongan terdiri dari daratan rendah dan berawa dengan tingkat ketinggian 0-25 m seluas 50,17%, sedangkan ketinggian 25-100 m seluas 45,68%, selebihnya 4,15% berketinggian di atas 100 m di atas permukaan air laut.

Jika dilihat dari kemiringan tanahnya, wilayah Kabupaten Lamongan merupakan wilayah yang relatif datar, karena hampir 72,5% lahannya adalah datar atau dengan tingkat kemiringan 0-2% yang tersebar di Kecamatan Lamongan, Deket, Turi, Sekaran, Tikung, Pucuk, Sukodadi, Babat, kalitengah, Karanggeneng, Glagah, Karangbinangun, Mantup, Sugio, Kedungpring, Sebagian Bluluk, Modo dan Sambeng. Sedangkan hanya sebagian kecil dari wilayahnya adalah sangat curam, atau kurang dari 1% (0,16%) yang mempunyai tingkat kemiringan lahan 40% lebih.

4.1.1.3 Keadaan Penduduk

Jumlah peduduk Kabupaten Lamongan pada tahun 2011 sebanyak 1.305.898 jiwa, dengan jumlah pencari kerja sebanyak 1.706 orang. Jika dibandingkan dengan kecamatan lain maka Kecamatan Brondong dan Kecamatan Paciran termasuk dalam kategori wilayah yang padat penduduk yaitu 57.205 jiwa dan 78.698 jiwa. Data jumlah penduduk Kabupaten Lamongan berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 5.

4.1.1.4 Potensi Perikanan Tangkap

Dengan panjang pantai yang mencapai 47 km^2, Kabupaten Lamongan mempunyai potensi perikanan laut yang cukup menjanjikan. Usaha penangkapan ikan laut di Kabupaten Lamongan terpusat di perairan Laut Jawa pada wilayah Kecamatan Brondong dan Kecamatan Paciran yang memiliki 5 Tempat

Pendaratan Ikan (TPI), yaitu mulai dari arah timur ke barat (Weru, Kranji, Brondong, Labuhan dan Lohgung). Dilihat dari produksinya paling tinggi adalah Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong yang mencapai ± 100 ton/hari, dibandingkan dengan keempat pangkalan pendaratan ikan yang lain yaitu Weru, Kranji, Labuhan dan Lohgung yang hanya mencapai 10 ton/hari.

Tabel 2. Jumlah penduduk Kabupaten Lamongan berdasarkan jenis kelamin

No.	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Sukorame	10.797	11.057	21.854
2.	Bluluk	11.099	11.596	22.695
3.	Ngimbang	21.239	21.633	42.872
4.	Sambeng	28.006	26.712	54.718
5.	Mantup	21.655	22.032	43.687
6.	Kembangbahu	21.769	22.990	44.759
7.	Sugio	29.933	30.832	60.765
8.	Kedungpring	31.925	33.906	65.831
9.	Modo	23.572	24.535	48.107
10.	Babat	41.965	43.220	85.185
11.	Pucuk	25.000	26.267	51.267
12.	Sukodadi	28.652	29.494	58.146
13.	Lamongan	32.022	33.825	65.847
14.	Tikung	20.304	21.038	41.342
15.	Sarirejo	12.526	13.007	25.533
16.	Deket	22.139	22.315	44.454
17.	Glagah	16.380	10.871	27.251
18.	Karangbinangun	22.748	22.980	45.728
19.	Turi	25.986	27.158	53.144
20.	Kalitengah	17.401	17.932	35.333
21.	Karanggeneng	23.416	24.244	47.660
22.	Sekaran	30.118	30.135	60.253
23.	Maduran	20.119	21.808	41.927
24.	Laren	17.168	20.100	37.268
25.	Solokuro	21.515	22.854	44.369
26.	Paciran	38.352	40.346	78.698
27.	Brondong	27.456	29.749	57.205
	Jumlah/ Total	**643.262**	**662.636**	**1.305.898**

Sumber : Lamongan Dalam Angka 2012

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Secara umum produksi hasil tangkapan perikanan di wilayah Kabupaten Lamongan, Laut Utara Jawa Timur sebagai berikut :

1. Produksi ikan permukaan didominasi oleh jenis ikan layang, yaitu mencapai 24,48%, produksi ikan dasar di dominasi oleh ikan kuniran sebesar 20,55%, produksi ikan karang didominasi oleh ikan bambangan sebesar 3,52%, produksi cumi-cumi sangat rendah yaitu sebesar 0,74%, begitu pula untuk produksi udang yang mencapai 0,28%.
2. Komposisi produksi ikan-ikan permukaan (pelagis) mencapai 51,14 yang tidak jauh beda dengan produksi ikan dasar (demersal), sehingga aktivitas dan lapangan kerja usaha perikanan pelagis dan demersal di perairan Laut Jawa keduanya memegang peranan penting terhadap perolehan produksi ikan, lapangan kerja dan pendapatan nelayan.
3. Dengan tersedianya bahan baku industri, dari jenis ikan yang cukup sekalipun relatif bervariasi, maka perikanan laut di wilayah Kabupaten Lamongan, Laut Utara Jawa Timur menunjukkan tipe perikanan multi spesies yang sebenarnya.

4.1.2 Gambaran Umum Daerah Kawasan Minapolitan

Kawasan minapolitan berbasis perikanan tangkap di Kabupaten Lamongan dikembangkan dalam struktur kewilayahan meliputi Kecamatan Brondong sebagai sentra kawasan minapolitan (minapolis), dengan PPN Brondong sebagai Pusat Pengelolaan Minapolitan (PPM). Sebagai kawasan pendukung minapolis, dilihat dari potensi yang ada maka ditetapkan Kecamatan Paciran sebagai *hinterland.* Kecamatan Paciran ditunjuk sebagai kawasan *hinterland* karena selain lokasinya bersebelahan dengan Kecamatan Brondong dan memiliki potensi perikanan, Kecamatan Paciran merupakan pusat pariwisata di Kabupaten Lamongan.

4.1.2.1 Kecamatan Brondong

Kecamatan Brondong merupakan bagian wilayah Kabupaten Lamongan yang terletak di belahan utara. Wilayah Kecamatan Brondong yang meliputi areal seluas 7.013,62 Ha atau 70.13 km^2, ± 50 km dari ibu kota Kabupaten Lamongan. Wilayah Kecamatan Brondong terdiri atas 9 desa 1 kelurahan, 22 dusun 2 lingkungan kelurahan, 57 RW 266 RT dan 11.949 KK. Kecamatan ini berada pada koordinat antara 06° 53' 30,81" – 7° 23' 6" Lintang Selatan dan 112° 17' 01,22" – 112° 33' 12" Bujur Timur, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah utara : Laut Jawa

Sebelah timur : Kecamatan Paciran

Sebelah selatan : Kecamatan Laren dan Kecamatan Solokuro

Sebelah barat : Kecamatan Palang Tuban

Dilihat dari keadaan geografisnya, maka Kecamatan Brondong dapat dikategorikan menjadi dua bagian. Yaitu daerah pantai dan daerah pertanian. Daerah pantai terletak di sebelah utara meliputi Kelurahan Brondong, Desa Sedayulawas, Desa Labuhan dan Desa Lohgung. Di daerah ini sangat cocok untuk budidaya ikan (tambak udang, ikan kerapu dan bandeng) serta usaha penangkapan ikan di laut. Terdapat usaha budidaya dengan areal tambak seluas 1.280,4 ha. Mencakup areal budidaya udang vaname 66 ha (operasional), bandeng 574 ha, kerapu 75 ha, tambak garam 228 ha, dan sisanya tambak mangkrak (*idle*) dengan jumlah RTP 41 orang. Di kecamatan ini terdapat Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong. Sehingga pada daerah tersebut mayoritas mata pencaharian penduduknya adalah sebagai nelayan dan petani tambak. Sedangkan daerah yang lain adalah daerah kawasan pertanian yang meliputi Desa Sumberagung, Desa Sendangharjo, Desa Lembor, Desa Tlogoretno, Desa Sidomukti dan Desa Brengkok, dengan kondisi pertanian tadah hujan.

Jumlah penduduk di wilayah Kecamatan Brondong sampai akhir bulan april 2012 mengalami peningkatan yaitu sebanyak 57.344 jiwa terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 27.515 jiwa dan perempuan sebanyak 29.829 jiwa. Data jumlah penduduk masing-masing desa/ kelurahan di Kecamatan Brondong sebagai berikut :

Tabel 3. Luas wiayah dan jumlah penduduk di Kecamatan Brondong

No.	Desa	Luas Km^2	Jumlah Penduduk	Jumlah KK	Kepadatan/ Km^2
1.	Brondong	2,34	10.559	3.652	4.215
2.	Sumberagung	4,16	2.462	1.161	567
3.	Sedayulawas	10,64	11.881	4.054	1.055
4.	Sendangharjo	7,44	5.183	1.837	669
5.	Lembor	16,07	2.475	1.027	144
6.	Tlogoretno	3,48	1.341	775	348
7.	Brengkok	10,57	10.004	3.399	864
8.	Labuhan	6,43	6.708	1.819	1.028
9.	Sidomukti	6,09	3.864	2.287	606
10	Lohgung	2,91	2.867	1.137	869
Jumlah		**70,13**	**57.344**	**21.148**	**769**

Sumber : Data Statistik dan Profil Kecamatan Brondong Tahun 2012

Jumlah penduduk usia dewasa di wilayah Kecamatan Brondong mencapai 32.693 jiwa, memiliki mata pencaharian yang beraneka ragam diantaranya :

Tabel 4. Jumlah penduduk Kecamatan Brondong berdasarkan mata pencaharian

No.	Desa	Petani	Dagang	Nelayan	Pegawai Negeri	Lainnya
1.	Brondong	257	778	4.436	56	480
2.	Sumberagung	885	84	231	7	73
3.	Sedayulawas	2.625	942	2.503	89	551
4.	Sendangharjo	3.106	37	252	22	96
5.	Lembor	1.080	21	52	5	67
6.	Tlogoretno	682	12	26	3	82
7.	Brengkok	4.820	89	426	12	307
8.	Labuhan	82	698	2.325	11	516
9.	Sidomukti	2020	69	62	9	106
10.	Lohgung	75	56	1.364	7	97
	Jumlah	**15.632**	**2.786**	**11.677**	**223**	**2.375**

Sumber : Data Statistik dan Profil Kecamatan Brondong Tahun 2012

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

4.1.3 Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong

Bedasarkan SK Menteri Pertanian No. 428/KPTS/410/1987 tanggal 14 Juli 1987, secara resmi pelabuhan perikanan Brondong ditetapkan menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelabuhan Perikanan Nusantara (Type B) sampai saat ini. PPN Brondong sebagai titik temu (*terminal point*) yang menguntungkan antara kegiatan ekonomi di laut dengan kegiatan ekonomi di darat telah terbukti mampu melakukan revitalisasi terhadap fungsi dan peranannya sehingga menjadikannya sebagai "*Centre of Excelence*" bagi pengembangan perikanan tangkap serta sebagai pusat pembinaan nelayan dan industri pengolahan hasil perikanan.

Lokasi Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong terletak di Kelurahan Brondong, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur dengan posisi koordinat secara geografis pada 06° 53' 30,81" LS dan 112° 17' 01,22" BT. Sebagai basis utama perikanan laut di wilayah utara Jawa Timur karena daerah tangkapnya (*fishing ground*) adalah laut utara jawa yang menjangkau perairan laut lepas pantai yang sangat potensial dengan beragam jenis ikan baik pelagis maupun demersal, PPN Brondong dapat menstabilkan harga ikan sebagai pemicu dalam menarik minat nelayan daerah lain untuk memasarkan ikannya.

a. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : PER. 06/MEN/2007 tanggal 25 Januari 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan, maka ditindaklanjuti dengan menyusun struktur organisasi PPN Brondong seperti gambar 5.

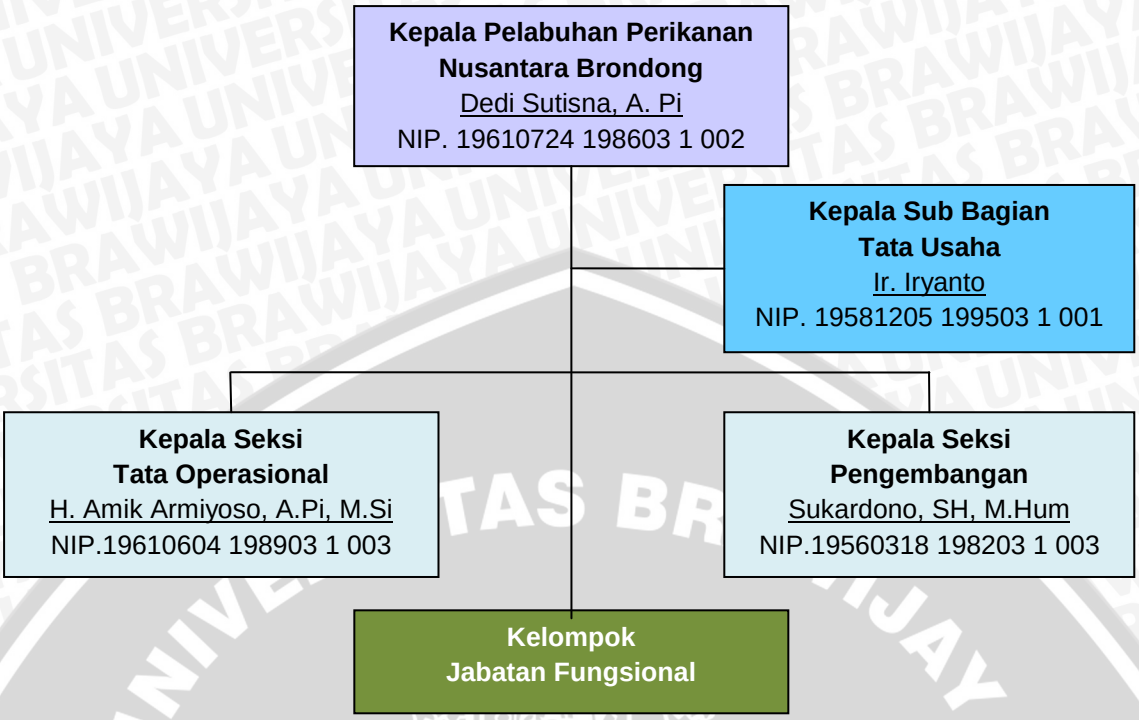

Gambar 7. *Struktur Organisasi PPN Brondong*

Jumlah pegawai Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong sampai dengan akhir tahun 2011 sebanyak 75 orang dengan komposisi pegawai berdasarkan golongan dan tingkat pendidikan sebagai berikut :

Tabel 5. Daftar pegawai pelabuhan berdasarkan golongan dan tingkat pendidikan

No	Pendidikan	Golongan / Status						Jumlah
		IV	III	II	I	CPNS	Tenaga Kontrak	
1.	S2 Adm. Publik	1	-	-	-	-	-	1
2.	S2 Ilmu Hukum	1	-	-	-	-	-	1
3.	Sarjana/DIV Perikanan	1	14	-	-	5	-	20
4.	Sarjana Ekonomi	-	7	-	-	-	-	7
5.	D III Perikanan	-	-	2	-	-	-	2
6.	D III Akuntansi	-	-	1	-	-	-	1
7.	SLTA	-	7	20	-	-	6	33
8.	SUPM	-	-	1	-	1	2	4
9.	SLTP	-	-	-	4	-	1	5
	SD	-	-	1	-	-	-	1
Jumlah		**3**	**28**	**25**	**4**	**6**	**9**	**75**

Sumber : Profil PPN Brondong Tahun 2012

b. Pemanfaatan Sarana dan Prasaran

Luas lahan pelabuhan perikanan sebesar 106.342 m^2 dengan rincian luas lahan pelabuhan lama sebesar 18.524 m^2 dan luas lahan pelabuhan baru sebesar 87.818 m^2.

Tabel 6. Pemanfaatan lahan untuk fasilitas pelabuhan

No.	Jenis Fasilitas	Luas	
		lahan	Bangunan
1	Dermaga / jetty		161 m, 364,5 m
2	Kolam pelabuhan	23,4 Ha	
3	Turap (Revetment)	2.139 m	
4	Jalan komplek	2000 m	
5	Breakwter		292 m
6	Tempat ibadah		100 m^2
7	Pagar keliling		380 m
8	Tendon air tawar		276 m^2
9	Tendon air laut		122,97 m^2
10	Pos jaga		24 m^2
11	Gedung PPDI		5.595 m^2
12	Bengkel pelabuhan		27,6 m^2
13	Gedung pabrik es		54 m^2
14	Gedung informasi		63 m^2
15	Gedung UBPT		54 m^2

Sumber : Profil PPN Brondong Tahun 2012

Tabel 7. Pemanfaatan lahan oleh pihak umum

No.	Jenis Fasilitas	Luas	Pihak Yang Memanfaatkan
1	Lahan tanah	1.000 m^2	Kios (disewa pihak ke-3 KPRI Nusantara Jaya)
2	Gedung bangunan	48 m^2	Kantor PT. Jamsostek (disewa pihak ke-3 PT. Jamsostek)
3	Gedung bangunan	18 m^2	MCK (disewa pihak ke-3 KPRI Nusantara Jaya)
4	Lahan tanah	29 m^2	Gudang es curah (disewa pihak ke-3 KPRI Nusantara Jaya)

Lanjutan dari tabel 7.

No	Jenis Fasilitas	Luas	Pihak Yang Memanfaatkan
5	Gedung bangunan	47 m^2	MCK (disewa pihak ke-3 KPRI Nusantara Jaya)
6	Lahan tanah	700 m^2	Tempat penanganan, pengolahan, dan penampungan ikan (Dinas Kelautan Perikanan)
7	Bangunan semi permanen	348 m^2	Tempat penanganan, pengolahan, dan penampungan ikan (KPRI Nusantara Jaya)
8	Bangunan gedung	58 m^2	Kantor BPR Jatim Cb. Lamongan (BPR Jatim Cab. Lamongan)
9	Bangunan semi permanene	24 m^2	Kios
10	Lahan tanah	8.106 m^2	Disewa oleh pihak ke-2 (PT. Bintang Timur Samudera)
11	Lahan tanah	4000 m^2	Disesa oleh pihak ke-3 (PT. Alam Jaya)

Sumber : Profil PPN Brondong Tahun 2012

Sisa lahan pelabuhan baru sebesar 69.694,03 m^2 dan digunakan untuk pembangunan fasilitas pelabuhan perikanan serta area industri yang akan disewakan ke pihak ke-3

c. Fasilitas yang Tersedia di Kawasan Pelabuhan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, PPN Brondong dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas sebagai berikut :

Tabel 8. Fasilitas Pokok PPN Brondong

No	Jenis Fasilitas	Volume	Kepemilikan
1.	Areal pelabuhan	2,59 Ha	Perum
	Lahan industri	1,85 Ha	PPNBr I (*Full Capacity*)
	Lahan industri	8,78 Ha	PPNBr II
2.	Dermaga/ jetty	161 m	PPNBr I
		364,5 m	PPNBr II
3.	Kolam pelabuhan	23,4 Ha	PPNBr
4.	Turap (revetment)	2.139 m	PPNBr
5.	Jalan komplek	2000 m	PPNBr
6.	Breakwater	292 m	PPNBr

Sumber : Profil PPN Brondong Tahun 2012

Tabel 9. Fasilitas penunjang PPN Brondong

No.	Jenis Fasilitas	Volume	Kepemilikan
1.	Tempat ibadah	100 m^2	PPNBr
2.	Pagar keliling	380 m	PPNBr
3.	Mess operator	250 m^2	Perum
4.	Rumah kalabuh	120 m^2	Perum
5.	Rumah dinas	170 m^2	Perum
6.	Kios/ warung	250 m^2	Perum

Sumber : Profil PPN Brondong Tahun 2012

Tabel 10. Fasilitas fungsional PPN Brondong

No.	Jenis Fasilitas	Volume	Kepemilikan
1.	Gedung TPI	1080 m^2	Perum
2.	Gudang keranjang	100 m^2	Perum
3.	Shelter nelayan	100 m^2	Perum
4.	Tangki air dan instalasi	170 m^3	Perum
5.	Tangki BBM	150 ton, 25 ton	Perum
6.	Listrik dan instalasi	345 KVA	Perum
7.	Genset dan instalasi	170 KVA	Perum
8.	Tempat penjualan BBM	36 m^2	Perum
9.	Bengkel	120 m^2	Perum
10.	Kantor Perum	200 m^2	Perum
11.	Pabrik es balok	15 & 50 ton/hari	Perum
12.	Pabrik es curai	-	Perum (rusak)
13.	Ruang pengepakan ikan	240 m^2	Perum
14.	Areal parkir	800 m^2	Perum
15.	Ruang sortir ikan	120 m^2	Perum
16.	Rumah genset	60 m^2	Perum
17.	Tower air	1 unit	Perum
18.	BPN	125 m^2	PPNBr I
19.	Pos masuk	25 m^2	PPNBr I
20.	Kantor pelabuhan	348 m^2	PPNBr I
21.	Los pengepakan ikan	180 m^2	PPNBr I
22.	MCK	60 m^2	PPNBr I
23.	Los pem. Kep. Ikan	300 m^2	PPNBr I
24.	Refer container	1 unit	PPNBr I
25.	Rambu navigasi	4 buah	PPNBr I
26.	Pabrik es mini	1 unit	PPNBr I
27.	Seawater treatment	1 unit	PPNBr I
28.	Gedung UBPT	12,9 m^2	PPNBr I
29.	Gedung WASDI	1 unit	PPNBr I
30.	Bengkel pelabuhan	27,6 m^2	PPNBr I
31.	Pos satpam	18 m^2	PPNBr I
32.	Area bongkar muat	960 m^2	PPNBr I
33.	Pos jaga	24 m^2	PPNBr II*
34.	Sea water tank	1 unit	PPNBr II*
35.	Gedung pelelangan	2.976 m^2	PPNBr II*
36.	Ruang sortir ikan	744 m^2	PPNBr II*
37.	Kantor administratur	96 m^2	PPNBr II*
38.	Ruang pembongkaran	769 m^2	PPNBr II*
39.	Tandon air tawar	1 unit	PPNBr II*
40.	Jaringan listrik	240 KVA	PPNBr II*

Sumber : Profil PPN Brondong Tahun 2012

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

d. Keragaan Operasional

Rekapitulasi kegiatan operasional di PPN Brondong sejak tahun 2007 sampai tahun 2011 adalah sebagai berikut :

Tabel 11. Kegiatan operasional di PPN Brondong

Kegiatan	Sat	2007	2008	2009	2010	2011
Produksi Ikan	Ton	60.769	52.249	57.198	46.432	49.278
Kunjungan Kapal	Kapal	24.379	22.327	25.573	19.681	13.769
Nilai Produksi Ikan	Milyar	421,8	442,32	495,41	437,82	511.79
Penyaluran Perbekalan						
a. Penyaluran Es	Ton	54.031	56.602	57.625	59.378	50.209
b. Penyaluran Air	M3	94.530	22.638	28.211	27.738	26.818
c. PenyaluranBBM	Ton	26.817	1.250	3.800	6.074	6.360
Pendapatan Pelabuhan	Juta	11.955,31	19.123,83	29.132,31	38.626,10	40.668,63
a. PNBP	Juta	43,96	75,83	118,15	146,80	281.95
b. Pendapatan Perum	Juta	11.020,35	18.091,5	28.162,92	37.734,34	39.625,91
c. Jasa Retribusi Lelang	Juta	891	957	851,24	744,96	760,77
Jumlah Tenaga Kerja yang terserap	Orang	15.537	15.239	15.460	14.800	14.418
Jumlah Nelayan	Orang	14.101	13.667	13.997	13.337	12.955
Jumlah Kapal Ikan	Unit	1.525	1.528	1.546	1.520	1.436
Jumlah Alat Tangkap	Unit	1.525	1.528	1.466	1.440	1.348
Jumlah Uang yg Beredar	Milyar	448,50	476,56	540,31	495,14	572,62

Sumber : Profil PPN Brondong Tahun 2012

e. Instansi Terkait

Berdasarkan pada KEPMENTAN No. 1082/Kpts/OT.210/10/99 tentang tata hubungan kerja UPT pelabuhan perikanan dengan instansi terkait, maka PPN Brondong banyak bekerjasama dengan instansi yang mempunyai sektor terkait dengan pembangunan kelautan dan perikanan untuk menciptakan kondisi pelabuhan yang dinamis serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. Yaitu bekerjasama dengan Pengawas Sumberdaya Ikan, Perum PPS Cabang Brondong, Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP), KUD Mina Tani, Puskesmas, Bank Swamitra Mina, Unit Usaha Kecil, Jamsostek,

TPI Labuhan Tengah, TPI Labuhan Barat, TPI Labuhan Timur, TPI Weru, TPI Kranji dan TPI Brondong.

4.2 Profil Minapolitan Perikanan Tangkap Kabupaten Lamongan

4.2.1 Visi dan Misi

Visi kawasan minapolitan berbasis perikanan tangkap di Kabupaten Lamongan adalah terwujudnya minapolis yang memiliki daya saing dengan dukungan pemanfaatan sumberdaya laut berbasis lingkungan. Sedangkan misi dari kawasan minapolitan adalah :

1. Mengembangkan sektor perekonomian berbasis rakyat dengan komoditas bidang perikanan tangkap
2. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana perikanan yang dibutuhkan guna mendukung pengembangan kegiatan perikanan di Kabupaten Lamongan
3. Meningkatkan pelayanan pengembangan keterampilan teknis kepada para nelayan
4. Penggunaan teknologi penangkapan yang tepat guna
5. Mendayagunakan serta menjaga kelestarian sumberdaya alam
6. Mendorong berkembangnya industri perikanan dengan mewujudkan iklim investasi yang kondusif serta berkelanjutan

Secara umum minapolitan berbasis perikanan tangkap di Kabupaten Lamongan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nelayan di kabupaten Lamongan dengan tetap memperhatikan kelestarian sumberdaya ikan dan keberlangsungan stok di laut. Serta sasarannya adalah pengentasan kemiskinan di pusat kegiatan (minapolis) dan kawasan pendukung sekitarnya (*hinterland*).

4.2.2 Kawasan Minapolitan

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lamongan nomor 188/152/Kep/413.013/2011, tanggal 14 juni 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Lamongan nomor 188/213/Kep/413.013/2010 Tentang Penetapan Kawasan Minapolitan Kabupaten Lamongan Tahun 2010, maka minapolitan perikanan tangkap di wilayah Kabupaten Lamongan terletak di Kecamatan Brondong sebagai sentra kawasan minapolitan (minapolis) dengan Pusat Pengelolaan Minapolitan (PPM) di PPN Brondong, dan Kecamatan Paciran sebagai kawasan pendukung atau *hinterland*.

Kecamatan Brondong ditetapkan sebagai kawasan minapolis karena dilihat dari tingginya potensi perikanan yang dimiliki, serta terdapat PPN Brondong dan TPI Brondong yang merupakan tempat pendaratan ikan terbesar di Kabupaten Lamongan. Sedangkan Kecamatan Paciran ditetapkan sebagai kawasan *hinterland* selain karena potensi perikanannya juga daerah tersebut merupakan pusat pariwisata di Kabupaten Lamongan sehingga diharapkan mampu mendukung peningkatan perekonomian dari kawasan minapolis.

4.2.3 Komoditas Unggulan

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lamongan nomor 188/152/Kep/413.013/2011, tanggal 14 juni 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Lamongan nomor 188/213/Kep/413.013/2010 Tentang Penetapan Kawasan Minapolitan Kabupaten Lamongan Tahun 2010, maka ditetapkan juga komoditas unggulannya yaitu ikan tongkol, kembung, layang dan kuniran. Komoditas ini ditetapkan sebagai komoditas unggulan karena produksinya yang banyak dan stabil serta memiliki permintaan pasar yang tinggi. Secara lebih jelas ikan tongkol, kembung, layang dan kuniran dapat dilihat pada gambar 6.

(a)

(b)

(c)

(d)

Gambar 8. (a) ikan tongkol, (b) ikan layang, (c) ikan Kembung, dan (c) ikan kuniran

4.2.4 Pengelola Minapolitan

Berdasarkan Surat Keputusan bupati Nomor : 188/199/Kep/413.013/2011, tanggal 4 Agustus 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/202.1/Kep/413.013/2010, Tentang Kelompok Kerja Pengembangan Kawasan Minapolitan Kabupaten Lamongan, maka dibentuk tim POKJA (Kelompok Kerja) seperti yang terlihat pada tabel 15.

Tabel 12. Susunan tim POKJA minapolitan Kabupaten Lamongan

No	Jabatan dalam kelompok	Keterangan
1.	Penanggung jawab 1	Bupati Lamongan
2.	Penanggung jawab 2	Wakil Bupati Lamongan
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
4.	Sekretaris	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan
5.	Bidang perencanaan	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Lanjutan tabel 12

No	Jabatan dalam kelompok	Keterangan
6.	Bidang pemberdayaan/ pelaksanaan	1. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Lamongan 2. Kepala Bidang Perikanan Budidaya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan 3. Kepala Bidang Perikanan Tangkap pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan
7.	Bidang monitoring/ evaluasi	1. Kepala Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan 2. Kepala Bagian Perekonomian Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan 3. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
8.	Anggota	1. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan 2. Kepala Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Lamongan 3. Kepala Dinas PU Pengairan Kabupaten Lamongan 4. Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan 5. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Lamongan 6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 7. Kepala Bidang Fisik dan Prasarana pada Badan Prencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan 8. Kepala Unit Pengelolaan Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Lamongan 9. Camat Wilayah Pengembangan Kawasan Minapolitan Kabupaten Lamongan 10. Kepala UPT Perikanan dan Kelautan Kecamatan Wilayah Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Lamongan

Sumber : Masterplan Pengembangan Kawasan Minapolitan Kabupaten Lamongan

4.2.5 Implementasi Minapolitan

Sejak dikeluarkannya SK Bupati tentang Penetapan Kawasan Minapolitan, telah dilaksanakan satu kali sosialisasi, dua kali rapat koordinasi tingkat daerah dan satu kali rapat koordinasi tingkat pusat, serta satu kali monitoring dan

evaluasi dari pemerintah daerah. Implementasi program minapolitan perikanan tangkap di Kabupaten Lamongan merupakan realisasi dari matrik program yang telah tersusun. Dari 63 kegiatan yang terdapat dalam matrik program kegiatan minapolitan perikanan tangkap tahun 2012, sampai saat ini hanya enam kegiatan yang terlaksana dan sembilan kegiatan lain sebagai kegiatan penunjang. Menurut hasil wawancara baik dengan pihak DKP maupun Bappeda kabupaten Lamongan, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program minapolitan ini adalah keterbatasan anggaran dana yang turun, maka pelaksanaan kegiatan tersebut disesuaikan dengan dana yang ada. Sehingga pelaksanaan kegiatan tidak seideal yang tertuang dalam perencanaan. Rincian kegiatan yang sudah terencana, terlaksana dan kegiatan penunjang dapat dilihat pada tabel 23.

Dalam implementasi program kebijakan ada empat variabel penting, yaitu komunikasi (*communications*), ketersediaan sumberdaya (*resources*), sikap dan komitmen dari pelaksana program (*disposition*) dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*).

1) Komunikasi (*communications*)

Komunikasi dalam pelaksanaan program ini dilakukan melalui koordinasi antar *stakeholder* maupun antara *stakeholder* dan masyarakat. Koordinasi diwujudkan dalam bentuk rakor (rapat koordinasi) antar *stakeholder* dan sosialisasi program kepada masyarakat. Koordinasi kondisional dan mendesak dilakukan melalui telephon. Kendala komunikasi yang dihadapi dari sisi masyarakat adalah sebagian nelayan masih bersifat apatis kepada kebijakan pemerintah sehingga tidak terlalu memperdulikan adanya sosialisasi. Sifat apatis masyarakat terhadap pemerintah ini sebagai akibat dari kegagalan atau implementasi dari program-program terdahulu yang kurang optimal sehingga timbul kekecewaan yang terus-menerus kepada pemerintah.

Dari hasil observasi dan wawancara kepada para nelayan pemilik kapal, beberapa dari mereka mengaku sering mendapat undangan dan ada yang tidak. Namun nelayan yang mendapat undangan tidak memprioritaskan undangan tersebut dengan alasan kesibukan melaut atau enggan saja. Sedangkan dari sisi pemerintah adalah undangan rakor yang ditujukan kepada nelayan seringkali mendadak bahkan terlambat sampai ke tangan nelayan, sehingga mereka seringkali tidak mengikuti rakor atau kegiatan lain. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan komunikasi secara dua arah, baik itu dari pemerintah maupun masyarakat.

2) Ketersediaan sumberdaya (*resources*)

Sumberdaya pendukung untuk melaksanakan kebijakan meliputi SDM, kewenangan, sarana dan prasarana, pendanaan. *Stakeholder* disini tidak hanya dari kalangan pejabat instansi yang terkait tetapi juga dari masyarakat nelayan pemilik kapal. Dengan kualitas SDM nelayan yang rendah maka pemerintah benar-benar harus berusaha memahamkan mereka terkait arah kebijakan minapolitan, sehingga mereka bisa mentransfer dan menyebarkan pemahaman mereka kepada nelayan yang lain. Sarana dan prasarana terkait erat dengan pendanaan. Menurut hasil wawancara dengan pihak Bappeda dan DKP Kabupaten Lamongan, kendala pelaksanaan kegiatan dalam matrik program termasuk pembangunan infrastruktur adalah minimnya anggaran dana yang turun, sementara itu tidak ada alternatif sumber pendanaan lain. Sehingga waktu pelaksanaan maupun tingkat pelaksanaannya disesuaikan dengan dana yang ada.

3) Sikap dan komitmen dari pelaksana program (*disposition*)

Komitmen dari implementator sudah cukup baik, hal ini terbukti dari terpenuhinya persyaratan minapolitan secara administratif, yaitu sesuai dengan RTRW daerah, masuk ke dalam RPIJMD, adanya SK bupati terkait

penetapan kawasan dan tim POKJA, dan kontribusi APBD. Namun berdasarkan hasil wawancara baik dengan pihak pemda maupun DKP Lamongan, tanggapan mereka biasa-biasa saja dengan adanya program minapolitan. Kurangnya antusiasme mereka disebabkan karena mereka menganggap bahwa pada hakikatnya program minapolitan tujuannya sama dengan program-program sebelumnya.

4) Struktur birokrasi (*bureaucratic structure)*

Menilai dari instansi yang terkait dalam pelaksanaan program minapolitan maka tim POKJA yang terbentuk sudah sesuai dengan kewenangannya. Kendala yang dihadapi adalah adanya pergantian tokoh minapolitan di dinas PPN Brondong sebagai instansi pelaksana program. Yaitu Sukardono, SH, M.Hum karena sudah pensiun maka digantikan oleh Ir. Ririn Sugihariyati. Sehingga membutuhkan waktu untuk transfer informasi dan pemahaman bagi tokoh minapolitan yang baru. Selain itu, perubahan struktur birokrasi di pusat juga mempengaruhi pelaksanaan program minapolitan. *Reshuffle* menteri perikanan dan kelautan dari Fadel Muhammad sebagai pencetus minapolitan yang kemudian digantikan oleh Sharif Cicip Sutardjo dengan membawa program baru yaitu industrialisasi perikanan, menyebabkan minapolitan tidak lagi menjadi program unggulan. Hal ini mengurangi antusiasme dari implementator dalam melaksanakan program minapolitan.

4.3 Analisa *Importance Performance Analysis* (IPA)

Importance Performance Analysis (IPA) merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis tingkat kepuasan dan tingkat kepentingan terhadap kinerja program pengembangan kawasan minapolitan. Hasil dari analisis IPA berupa nilai prioritas dan tingkat kinerja.

4.3.1 Analisis *Importance Performance Analysis* (IPA) Setiap Indikator Kualitas Pelayanan

Berdasarkan nilai tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan dari Program Pengembangan Kawasan Minapolitan dapat diketahui kelebihan dan kelemahan dari program tersebut dengan cara melihat indikator mana yang masuk pada Kuadran A, Kuadran B, Kuadran C, dan Kuadran D dengan menghitung nilai rata-rata seperti yang terlihat pada Tabel 16 :

Tabel 13. Perhitungan Rata-Rata Tingkat Kepentingan dan Rata-Rata Tingkat Kepuasan Per Indikator

No	Indikator	Bobot Skor Y	Bobot Skor X	Nilai Y	Nilai X
1.	Pembangunan Breakwater	95	462	3.2	2.7
2.	Pavingstone Jalan Pesisir Kec.Pac	94	465	3.1	2.5
3.	Perencanaan, Pengawasan dan Pemborongan Jalan	91	459	3.0	2.5
4.	Pengadaan Rumpon Dasar	101	457	3.4	2.8
5.	Pembinaan KUB Perikanan Tangkap	95	470	3.2	3.0
6.	Pengadaan Timbangan Ikan	101	468	3.4	3.2
7.	Rehabilitasi Breakwater	94	457	3.1	2.7
8.	Pembangunan Kantor POKMASWAS	88	452	2.9	2.8
9.	Pemborongan Pengadaan Instalasi Listrik	96	445	3.2	1.0
10.	Pengadaan Alat Tangkap Perikanan (Bubu)	88	439	2.9	2.7
11.	Pengadaan Payang Teri	96	434	3.2	2.7
12.	Review Masterplan	88	449	2.9	2.6
13.	Pengadaan Peralatan Pendukung PPDI (Paket 1)	95	469	3.2	2.6
14.	Pengadaan Peralatan Pendukung PPDI (Paket 2)	94	454	3.1	2.5

Sumber : data primer diolah

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Hasil perhitungan nilai X dan Y tersebut diplotkan pada gambar 7 berikut ini:

Diagram IPA

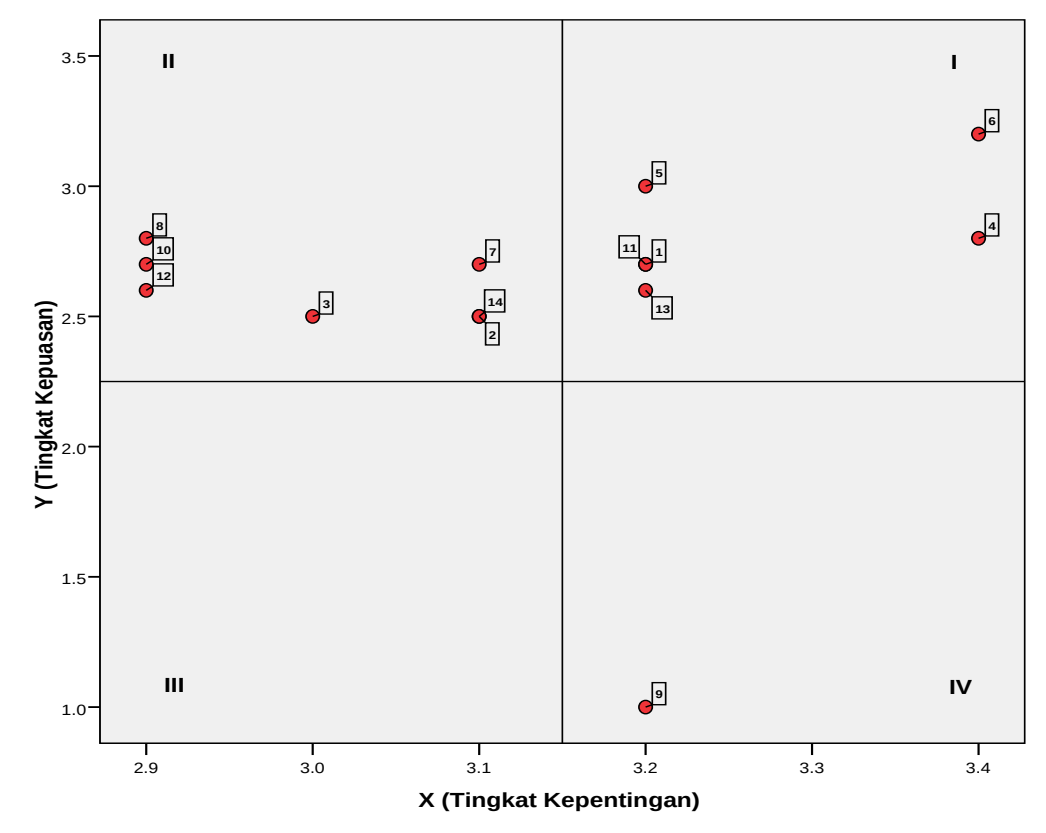

Gambar 9. Diagram IPA yang telah diolah

Sumber: Data primer diolah

Berdasarkan Gambar 7, dimana diagram terbagi menjadi empat bagian, maka diagram IPA dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Kuadran A (Prioritas Utama)

   Adalah kuadran yang memuat indikator yang dianggap penting oleh responden tetapi dalam kinerjanya, indikator ini belum sesuai seperti yang diharapkan oleh responden (tingkat kepuasan yang diperoleh masih sangat rendah). Dalam penelitian yang dilakukan untuk mengetahui komponen manakah dari program pengembangan kawasan minapolitan terhadap tingkat

kepuasan, terdapat 6 komponen yang masuk dalam Kuadran A yang menjadi prioritas utama yaitu:

a). Variabel 1 : Pembangunan *Breakwater*

b). Variabel 4 : Pengadaan rumpon dasar

c). Variabel 5 : Pembinaan KUB Perikanan Tangkap

d). Variabel 6 : Pengadaan Timbangan Ikan

e). Variabel 11 : Pengadaan Payang Teri

f). Variabel 13 : Pengadaan Peralatan Pendukung PPDI (Paket 1)

Berdasarkan hasil diatas maka pihak PPN Brondong perlu diperhatikan lagi keenam komponen tersebut agar pada pelaksanaan, memberikan kepuasan yang tinggi. Karena keberadaan variabel-variabel tersebut pihak pemerintah sebagai pelaku dan juga pengevaluasi kegiatan-kegiatan penting namun dalam pelaksanaannya tidak mendapatkan kepuasan dan belum sesuai dengan harapan pelaku kegiatan dan pengguna kegiatan.

Variabel 1 pembangunan *Breakwater* dianggap penting sebagai tambat labuh dan untuk aktivitas bongkar muat kapal-kapal nelayan, tetapi baru difungsikan oleh nelayan sebagai tambat labuh di dermaga baru sedangkan untuk aktivitas bongkar muat masih dilakukan di dermaga lama karena pembangunan *breakwater* ini dilakukan di dermaga baru yang jaraknya jauh dengan TPI. Menurut nelayan jika melakukan bongkar di dermaga pelabuhan baru, maka nelayan akan mengeluarkan biaya tambahan untuk mengangkut hasil tangkapan melalui jalan darat menuju TPI. Pertimbangan jarak TPI inilah yang menyebabkan nelayan tetap memilih melakukan kegiatan bongkar di area dermaga lama. Berikut adalah gambar *breakwater* di dermaga baru.

Gambar 10. Bangunan *breakwater*

Variabel 4 pengadaan rumpon dianggap penting sebagai upaya untuk menanggulangi atau mengantisipasi kepunahan ikan dan terumbu karang karena sebelum adanya program minapolitan, Pantai utara laut Jawa bagian Lamongan hampir kepunahan akan ikan dan terumbu karang karena banyak dari para penangkap ikan yang kurang memiliki kesadaran akan lingkungan laut melakukan penangkapan dengan cara-cara yang tidak efektif dan efisien yaitu menggunakan bom, racun dan bahan kimia lainnya yang jelas dapat merusak lingkungan laut dan perairan serta makhluk perairan lainnya seperti ikan dan terumbu karang sehingga menyebabkan kepunahan. Oleh karena itu dilakukan pengadaan rumpon dengan maksud agar ikan-ikan memiliki tempat-tempat perlindungannya kembali.

Variabel 5 pembinaan KUB (Kelompok Usaha Bersama) perikanan tangkap dianggap penting sebagai upaya untuk meningkatkan keterampilan nelayan dalam melakukan usaha bersama para nelayan lainnya, jumlah KUB yang telah terbentuk sebanyak 129 KUB, di Brondong ada 27 KUB dan di Paciran 102 KUB. KUB beranggotakan minimal 10 orang dan kuota maksimal 360 orang, dalam pelaksanaannya KUB diawasi oleh sebuah kelompok pengawas yang disebut dengan POSWASMAS (Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan). POSMASWAS dibentuk dengan tujuan untuk mengawasi KUB dalam cakupan daerah atau desa dan dapat disebut sebagai

mitra kerja dinas dalam hal pengawasan. Variabel 6 pengadaan timbangan ikan sebagai upaya untuk daya dukung TPI untuk nelayan dan pedagang. Variabel 11 pengadaan payang teri dilakukan untuk membantu para nelayan khususnya di wilayah brondong desa logung dan labuan. Variabel 13 pengadaan peralatan pendukung PPDI (Pusat Pemasaran dan Distribusi Ikan) paket 1 dianggap penting sebagai upaya melengkapi fasilitas-fasilitas sehingga PPDI dapat difungsikan sebagaimana mestinya.

2. Kuadran B (Pertahankan Prestasi).

Adalah kuadran yang memuat komponen yang dianggap penting oleh para responden dan sudah sesuai dengan kinerjanya. Adapun komponen yang termasuk dalam Kuadran B terdapat tujuh variabel adalah sebagai berikut:

a). Variabel 2 : Pavingstone jalan pesisir Kec. Pac

b). Variabel 3 : Perencanaan, pengawasan dan pemborongan jalan

c). Variabel 7 : Rehabilitasi *breakwater*

d). Variabel 8 : Pembangunan kantor POKMASWAS

e). Variabel 10 : Pengadaan alat tangkap perikanan (Bubu)

f). Variabel 12 : Review masterplan

g). Komponen 14 : Pengadaan peralatan pendukung PPDI (Paket 2)

Berdasarkan hasil diatas maka ketujuh variabel pada kuadran II ini menunjukkan bahwa tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan sudah sesuai menurut responden sehingga kondisi ini perlu dipertahankan oleh pihak pemerintah/ pelaksana, karena telah sesuai dengan kinerja dan memberikan tingkat kepuasan yang tinggi.

Variabel 2 Pavingstone jalan pesisir kecamatan paciran dianggap penting sebagai penghubung menuju hutan mangrove sebagai sarana untuk melakukan pengawasan hutan mangrove sehingga pihak pemerintah lebih

mudah dalam melakukan peninjauan. Variabel 3 perencanaan, pengawasan dan pemborongan jalan dilakukan meggunakan sistem tender atau lelang, pihak yang memenangkan tender berhak mengambil program yang ditenderkan tersebut.

Variabel 7 rehabilitasi *breakwater* telah dilakukan untuk meningkatkan daya dukung fasilitas tersebut sehingga dapat digunakan dengan optimal oleh masyarakat yang menggunakannya. Variabel 8 pembangunan kantor POKMASWAS sebagai upaya meningkatkan fasilitas guna meningkatkan kinerja POKMASWAS. Variabel 10 pengadaan alat tangkap bubu disalurkan di Sedayu lawas karena di wilayah tersebut masyarakat nelayannya dominan menggunakan alat tangkap bubu, sesuai dengan target tangkapnya merupakan rajungan. Variabel 12 review masterplan perlu dilakukan untuk memperbaiki atau melengkapi kembali masterplan disesuaikan dengan kebutuhan agar sesuai dengan perkembangan terbaru dalam lingkungan penerapan program minapolitan. Dan variabel 14 pengadaan peralatan pendukung PPDI paket 2 dianggap penting sebagai upaya melengkapi fasilitas-fasilitas sehingga PPDI dapat difungsikan sebagaimana mestinya.

3. Kuadran C (Prioritas Rendah)

Menunjukkan beberapa faktor yang kurang penting pengaruhnya bagi responden, kinerja yang diberikan dari komponen adalah biasa-biasa saja dan dianggap kurang penting. Tidak terdapat komponen yang termasuk dalam Kuadran C

4. Kuadran D (Berlebihan)

Variabel yang terletak di kuadran ini dianggap tidak terlalu penting dan tidak terlalu diharapkan sehingga perlu mengalokasikan sumberdaya yang terkait dengan kegiatan-kegiatan tersebut kepada kegiatan-kegiatan lain yang mempunyai prioritas penanganan lebih tinggi yang masih membutuhkan

peningkatan. Adapun variabel yang termasuk dalam Kuadran D, terdapat satu komponen, adalah sebagai berikut:

a) Komponen 9 : Pemborongan pengadaan instalasi listrik

Berdasarkan hasil diatas dapat diketahui komponen pemborongan pengadaan instalasi listrik dianggap berlebihan dalam memberikan kepentingan.

Kemudian untuk menentukan tingkat kesesuaian sistem dari komponen dihitung rasio atau perbandingan antara kinerja dan kepentingan komponen minapolitan:

4.3.2 Tingkat Kesesuaian (%)

Metode yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesesuaian responden adalah menggunakan rasio atau perbandingan antara penilaian kinerja komponen minapolitan dengan penilaian kepentingan komponen minapolitan. Tingkat kesesuaian responden dapat diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$TK_i = \frac{X_i}{Y_i} \text{ x } 100\%$$

Dimana:

Tki = tingkat kesesuaian responden

Xi = skor penilaian kinerja instrument Minapolitan

Yi = Skor penilaian kepentingan instrument Minapolitan

Berikut adalah hasil analisis dari tingkat kepentingan komponen program pengembangan kawasan Minapolitan:

Tabel 14. Tingkat Kesesuaian Komponen

Komponen	Kinerja	Kepentingan	TK_i	Keterangan
1.	2.7	3.2	84.21%	Puas
2.	2.5	3.1	79.79%	Puas
3.	2.5	3.0	81.32%	Puas
4.	2.8	3.4	82.18%	Puas
5.	3.0	3.2	95.79%	Puas
6.	3.2	3.4	94.06%	Puas
7.	2.7	3.1	87.23%	Puas
8.	2.8	2.9	94.32%	Puas
9.	1.0	3.2	31.25%	Tidak Puas
10.	2.7	2.9	90.91%	Puas
11.	2.7	3.2	84.38%	Puas
12.	2.6	2.9	87.50%	Puas
13.	2.6	3.2	82.11%	Puas
14.	2.5	3.1	80.85%	Puas

Berdasarkan tabel 17 tersebut dapat diketahui bahwa terdapat satu komponen, yaitu komponen 9 (pemborongan pengadaan instalasi listrik) memiliki nilai Tk_i (Tingkat kesesuaian) sebesar 31,25%. Hal ini menunjukkan bahwa responden cenderung tidak puas dengan pemborongan pengadaan instalasi listrik, dan sebaiknya dilakukan evaluasi agar lebih efektif dalam hal pemborongan pengadaan instalasi listrik.

4.4 Analisis Tingkat Perubahan yang Dirasakan oleh Masyarakat Pesisir

Berdasarkan besarnya perubahan yang dirasakan oleh masyarakat pesisir terhadap kegiatan program pengembangan kawasan minapolitan di PPN Brondong dapat diketahui sebagai berikut :

Tabel 15. Analisis Deskriptif Kuesioner

Item pertanyaan	Ya		Tidak	
	Jumlah	%	Jumlah	%
p1	10	33.33	20	66.67
p2	9	30.00	21	70.00
p3	11	36.67	19	63.33
p4	10	33.33	20	66.67
p5	11	36.67	19	63.33

Tabel 1 merupakan hasil analisis deskriptif dari item pertanyaan pada kuesioner. Untuk item p1 (pertanyaan 1) tentang pengadaan sarana dan prasarana dari program pengembangan kawasan minapolitan meningkatkan produksi perikanan, mayoritas responden menjawab tidak sebanyak 20 orang (66,67%) dan sebagian kecil menjawab ya sebanyak 10 orang (33,33%).

Untuk item p2 (pertanyaan 2) tentang pengadaan sarana dan prasarana dari program pengembangan kawasan minapolitan meningkatkan kualitas produk perikanan, mayoritas responden menjawab tidak sebanyak 21 orang (70%) dan sebagian kecil menjawab ya sebanyak 9 orang (30%).

Untuk item p3 (pertanyaan 3) tentang pengadaan sarana dan prasarana dari program pengembangan kawasan minapolitan meningkatkan pendapatan, mayoritas responden menjawab tidak sebanyak 19 orang (63,33%) dan sebagian kecil menjawab ya sebanyak 11 orang (36,67%).

Untuk item p4 (pertanyaan 4) tentang pengadaan alat tangkap (payang teri, bubu) dan rumpon dari program pengembangan kawasan minapolitan meningkatkan produksi hasil tangkap anda, mayoritas responden menjawab tidak sebanyak 20 orang (66,67%) dan sebagian kecil menjawab ya sebanyak 10 orang (33,33%).

Untuk item p5 (pertanyaan 5) tentang pengadaan alat tangkap (payang teri, bubu) dan rumpon dari program pengembangan kawasan minapolitan meningkatkan produksi pendapatan, mayoritas responden menjawab tidak sebanyak 19 orang (63,33%) dan sebagian kecil menjawab ya sebanyak 11 orang (36,67%).

Kegiatan dari program pengembangan kawasan minapolitan sudah berjalan 2 tahun sehingga masyarakat yang merasakan perubahan atau peningkatan terhadap produksi perikanan, kualitas produk perikanan dan pendapatan sebagai hasil dari pengadaan sarana dan prasarana maupun pengadaan alat tangkap belum maksimal karena program ini baru setengah jalan sehingga perlu dilakukan evaluasi agar hasilnya bisa optimal. Karena efektifnya program ini berjalan 4 tahun sesuai dengan yang sudah diprogramkan dari pusat yaitu tahun 2010-2014.

4.5 Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat

Berdasarkan hasil data yang dihimpun melalui observasi, wawancara, penyebaran angket dan studi pustaka, maka dapat dijabarkan faktor – faktor pendukung dan penghambat program pengembangan kawasan minapolitan perikanan tangkap di PPN Brondong Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

- Faktor Pendukung
  1. Pelabuhan Brondong beroperasi dengan status sebagai Pelabuhan Perikanan Nusantara atau pelabuhan perikanan tipe B dengan kegiatan operasional yang tinggi dan fasilitas yang cukup memadai.
  2. Letak geografis Kabupaten Lamongan yang strategis sebagai kota penyangga/ pendukung Kota Propinsi (Surabaya).

3. Permintaan ikan segar maupun olahan oleh pasar masih sangat tinggi. Semua jenis ikan dalam jumlah berapa pun akan diserap oleh pasar.
4. Sebagian besar nelayan telah melakukan penangkapan ikan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan. Hal ini akan menjaga keberlanjutan sumberdaya perikanan.

- Faktor Penghambat

1. Rendahnya kualitas SDM nelayan, hal ini menyebabkan beberapa hal yaitu:
   - Terbatasnya daya pikir nelayan untuk memahami konsep minapolitan sehingga nelayan cenderung berpikir jangka pendek.
   - Nelayan belum memahami pentingnya fasilitas yang disediakan oleh pemerintah, seperti bank, JAMSOSTEK, maupun bantuan kapal.
   - Nelayan masih sering mengabaikan tata tertib seperti menjaga kebersihan lingkungan TPI dan mengurus SIB.
2. Sumberdaya perikanan di Laut Jawa mengalami *over fishing*. Produksi hasil tangkapan mengalami penurunan.
3. Adanya keterbatasan dana dalam pembiayaan kegiatan program, hal ini karena anggaran dana yang turun tidak sesuai dengan anggaran dana yang diajukan serta tidak adanya sumber pendanaan selain dari APBN.
4. Terjadinya pembelian di atas kapal sebelum mendarat. Sehingga pelelangan menjadi kurang berfungsi, dan para pembeli ikan dari unit – unit pengolahan ikan tidak memiliki kesempatan untuk dapat membeli ikan di pelelangan. Akhirnya membeli dari tangan kedua dan harganya menjadi lebih mahal.
5. Kurangnya koordinasi antara *stakeholder* dan masyarakat sehingga timbul mis komunikasi dalam pembangunan *breakwater*. Masyarakat nelayan

menolak rencana rancang bangun *breakwater* pada tahap pembangunan selanjutnya, dengan alasan teknis rancangan bangunan *breakwater* yang mendekati pintu masuk kolam pelabuhan tidak sesuai dengan kondisi perairan maupun arah angin disitu.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan sehubungan dengan proses implementasi program pengembangan kawasan minapolitan perikanan tangkap di PPN Brondong Kabupaten Lamongan. Maka dapat disimpulkan beberapa hal antara lain :

1. Tingkat keberhasilan kegiatan program pengembangan kawasan minapolitan sudah mencapai 50% jika ditinjau dari tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan masyarakat.
2. Tingkat perubahan yang dirasakan oleh masyarakat belum maksimal (30%) baik terhadap produksi perikanan, kualitas produk perikanan dan pendapatan sebagai hasil dari pegadaan sarana dan prasarana maupun pengadaan alat tangkap.
3. Faktor – faktor pendukung program diantaranya adalah pelabuhan Brondong beroperasi dengan status sebagai Pelabuhan Perikanan Nusantara atau pelabuhan tipe B, letak Kabupaten Lamongan yang strategis sebagai daerah penyangga kota propinsi (Surabaya), permintaan pasar untuk ikan segar maupun olahan masih sangat tinggi, sebagian besar masyarakat nelayan menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan. Sedangkan faktor – faktor penghambatnya yaitu kualitas SDM nelayan masih rendah, sumberdaya perikanan Laut Jawa mengalami *over fishing*, adanya keterbatasan dana.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, maka beberapa saran berikut diharapkan dapat menjadi alternatif kebijakan untuk menunjang keberlanjutan

program pengembangan kawasan minapolitan perikanan tangkap di PPN Brondong Kabupaten Lamongan :

1. Pemerintah daerah hendaknya mencari sumber pendanaan lain yang sah, misalnya dari BUMD sebagai alternatif untuk menambah kekurangan dana.
2. Masih perlu mengoptimalkan sosialisasi maupun pelaksanaan kegiatan.
3. Masih perlu dilakukan evaluasi agar hasilnya bisa optimal karena efektifnya program ini berjalan 4 tahun seperti yang sudah diprogramkan dari pusat yaitu tahun 2010 – 2014.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DAFTAR PUSTAKA

Akib Haedar dan Tarigan Antonius, 2008. **Artikulasi Kosep Implementasi Kebijakan**. Universitas Negeri Makassar. Makassar

Bahagia, 2009. **Peran Pemerintah Daerah Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan Mangrove Pasca Tsunami Di Kecamatan Baitussalam Tahun 2008**. Universitas Sumatera Utara. Medan

Edward, George. C. 1980. **Implementing Public Policy. Washington D.C: Congressional Quarterly Inc**.

Hasan, 2002. **Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. Ghalia Indonesia.** Jakarta

Indriantoro, N dan B. Supomo. 2002. **Metode Penelitian Bisnis**, Edisi Pertama BPFE – Yogyakarta. Yogyakarta

Irianto, Erwin Wahyu. 2011. **Analisis Importance Performance Atribut Lingkungan Hunian Terhadap Persepsi Pembeli pada Perumahan Riverside Malang**. Malang

Karding, Abdul Kadir. 2008. **Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Semarang.** Magister Administrasi Publik Universitas Diponegoro. Semarang

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep. 18/Men/2011 tentang **Pedoman Umum Minapolitan**

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.39/Men/2011 Perubahan Atas Keputusan Menteri Perikanan Dan Kelautan Nomor Kep.32/Men/2010 tentang **Penetapan Kawasan Minapolitan**

Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2011. **Pedoman Umum Minapolitan**. Jakarta

Kusumastanto, 2003. **Ocean Policy dalam Membangun Negeri Bahari di Era Otonomi Daerah**. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta

Nazir. M. 2005. **Metode Penelitian**. Ghalia Indonesia. Jakarta

Setyadi, Iwan Tritenty. 2005. **Evaluasi Implementasi Proyek Inovasi Manajemen Perkotaan Pekerjaan Pemberdayaan Sektor Informal Pedagang Kaki Lima Kota Magelang**. (Tesis). Yogyakarta: MPKD Universitas Gajah Mada

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Soehartono, I. 2008. **Metode Penelitian Sosial**, Cetakan Ketujuh. Remaja Rosdakarya. Bandung.

Sudjana, S. 2001. **Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah, Makalah - Skripsi - Tesis- Disertasi.** Sinar Baru Algesindo. Bandung

Sugiyono. 2008. **Metode Penelitian Bisnis**. Penerbit Alfabet. Bandung

Suharto, Edi. 2008. **Analisis Kebijakan Publik**. Alfabeta. Bandung

Sumarwan, U. 2002. **Perilaku Konsumen (Teori dan Penerapannya Dalam Pemasaran)**. Ghalia Indonesia. Bogor

Supranto, J. 2006. **Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan untuk Menaikkan Pangsa Pasar**. PT.Rineka Cipta. Jakarta

Suryabrata, 1994. **Metodologi Penelitian**. CV. Rajawali. Jakarta

Wiadnya, Dewa Gede Raka. 2011. **Konsep Perencanaan Minapolitan dalam Pengembangan Wilayah. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya.** Malang

Yustina, Ida. 2003. **Perencanaan Program Penyuluhan. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara**. Sumatera Utara

Zulham, A dan Budi Wardono. 2010. **Perspektif Model Minapolitan Kawasan Pelabuhan Ratu. Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan.** Jakarta

Zulham, Armen. 2010. **Membangun Konsep Minnapolitan. Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan**. Jakarta

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Lampiran 1. Letak Geografis dan Masterplan Pengembangan Kawasan PPN Brondong

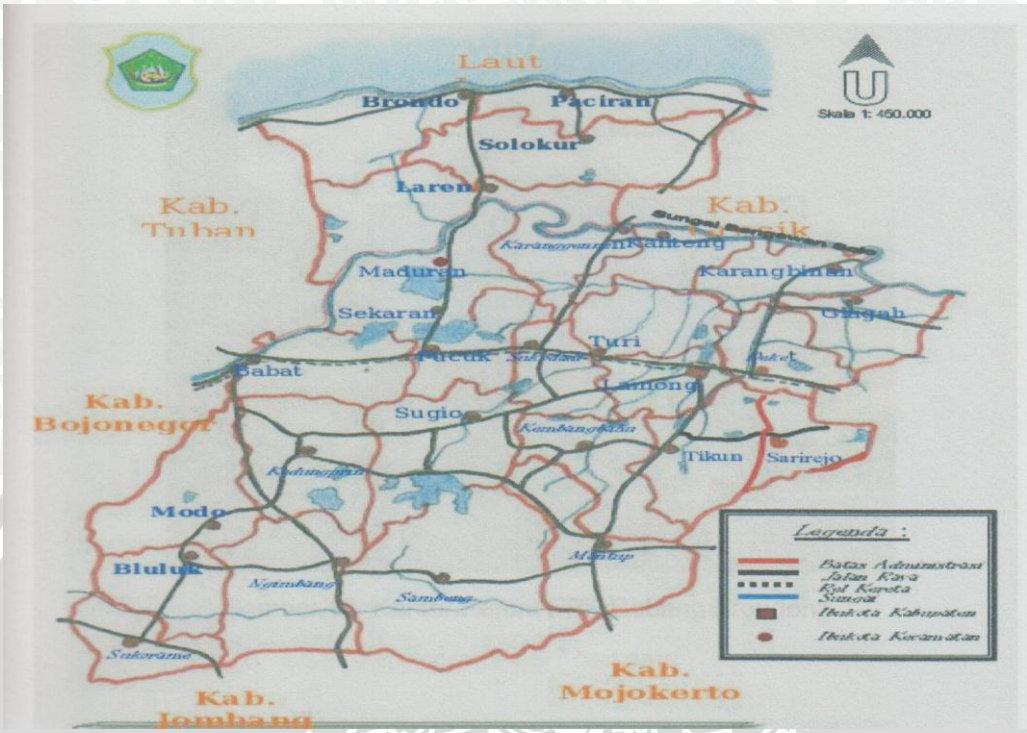

Gambar 9. Letak geografis kabupaten Lamongan

Gambar 10. Masterplan pengembangan kawasan minapolitan perikanan tangkap di PPN Brondong

Lampiran 2. Areal Pelabuhan

Gambar 11. Kantor PPN Brondong

Gambar 12. Bengkel pelabuhan

Gambar 13. TPI Brondong

Gambar 14. Tempat Penjualan BBM

Gambar 15. Area Parkir kapal

Gambar 16. Docking kapal

Lampiran 3. Beberapa fasilitas Penunjang di Kawasan PPN Brondong

Gambar 17. Kantor Perum PPS Cabang Brondong

Gambar 18. Kantor Payment Point BPR Jatim Cabang Brondong

Gambar 19. PUSKESMAS

Gambar 20. Kantor Syahbandar

Gambar 21. Pelayanan JAMSOSTEK

Lampiran 4. Dokumentasi pengambilan data dan penyebaran kusisioner

Gambar 22. Didepan kantor PPN Brondong

Gambar 23. Penyebaran kuesioner dengan pedagang

Gambar 24. Penyebaran kuesioner dengan juragan darat

Gambar 25. Penyebaran kuesioner dengan nelayan

Gambar 26. Penyebaran kuesioner dengan ketua RN Blimbing

Lampiran 5. Karakteristik Responden

No	Nama	Umur (Th)	Pekerjaan	Alamat
1	Amin	28	Pedagang	Brondong
2	Agus Aprianto	34	Pedagang	Brondong
3	Amin Rokhim	45	Juragan Laut	Blimbing
4	Wardi	50	Juragan Darat	Paciran
5	Sukatno	34	Pedagang	Kranji
6	Waras	42	Juragan Darat	Brondong
7	Fadhol	40	Ketua RN Blimbing	Blimbing
8	Slamet Priyanto	24	Pedagang	Kandang Semangkon
9	Shohibul M	38	Pedagang	Brondong
10	Mindarto	45	Juragan Darat	Kranji
11	Wiyono	49	Juragan Laut	Blimbing
12	H. Ahmad	54	Pedagang	Kranji
13	Fuad Hasan	51	Pedagang	Brondong
14	Budi Santosa	32	Pedagang	Paciran
15	Harnoto	48	PNS	Brondong
16	Basuki Rahmad	48	PNS	Brondong
17	Samari	52	Juragan Laut	Kranji
18	Putat Yanu	25	PNS	Brondong
19	Wasudi	32	Staff UPT TPI	Brondong
20	Warsono	46	Juragan Laut	Blimbing
21	Gilang	25	Penyuluh Perikanan	Brondong
22	Saiful	40	Pedagang	Paciran
23	Roch Amanan	48	PNS	Brondong
24	Suwarno	39	Pedagang	Brondong
25	Syaiful Ma'arif	45	PNS	Brondong
26	Parsuwito	46	Ketua RN Brondong	Brondong
27	Sukiswandi	50	Kepala UPT Kec.Brondong	Sedayu Lawas
28	Iryanto	54	PNS	Brondong
29	Toha Muslih	36	Penyuluh Perikanan	Paciran
30	Imawati	42	Juragan Darat	Blimbing

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Lampiran 6. Masterplan Pengembangan Tata Ruang di Kawasan PPN Brondong

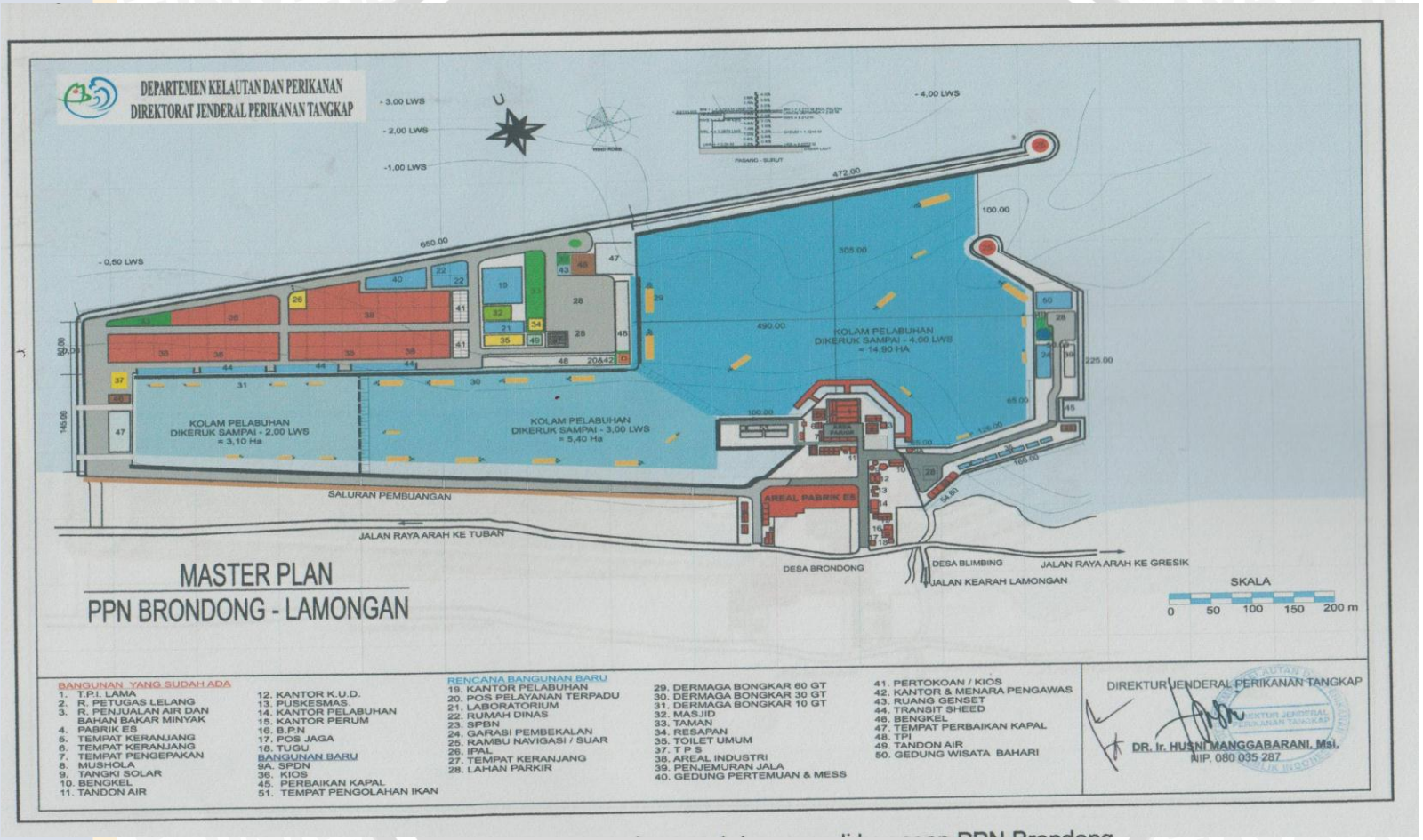

Gambar 27. Masterplan pengembangan tata ruang di kawasan PPN Brondong

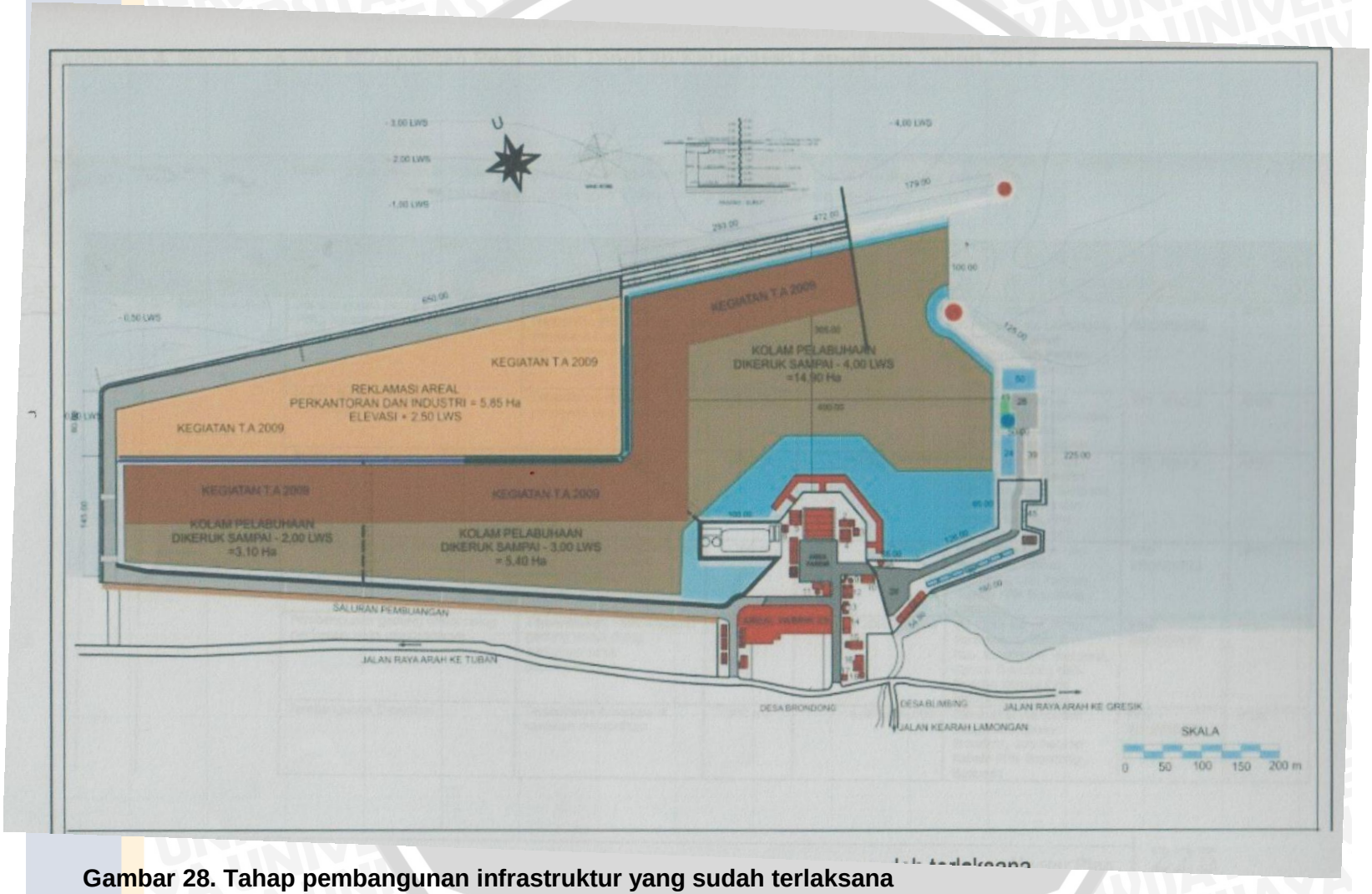

Gambar 28. Tahap pembangunan infrastruktur yang sudah terlaksana

Lampiran 7. Matrik program minapolitan perikanan pangkat kabupaten lamongan 2012

Tabel 11.1 Matrik Program Tahunan Kegiatan Minapolitan Berbasis Perikanan Tangkap
Kabupaten Lamongan Tahun Ke-1 sampai Tahun ke-5

Tahun	Kegiatan							
Tahun 2012	INFRASTRUKTUR	Pembangunan Gedung Perwakilan PMU, kantor pemasaran, ruang pelatihan dan showroom	Tersedianya Gedung Perwakilan PMU, kantor pemasaran, ruang pelatihan dan showroom	350 m²	1.000.000.000	Dinas Perikanan & Kelautan Kab. Lamongan, BAPPEDA, Camat Brondong dan Paciran Kepala PPN Brondong ,Bappeda	PPN BRONDONG	APBN
		Pemb. Menara Pengawas dan Pemasangan Lampu suar	Tersedianya menara Pengawas dan lampu suar	2 Unit	2.000.000.000	Dinas Perikanan & Kelautan Kab. Lamongan, BAPPEDA, Camat Brondong dan Paciran	PPI Kran Jl	APBN
		Pembangunan Penahan Gelombang	Tersedianya Penahan Gelombang	500 m'	5.000.000.000	PU Pengairan, Dinas Perikanan & Kelautan Kab. Lamongan, Bappeda, Camat Brondong dan Paciran Kepala PPN Brondong, Bappeda	PPI Kran Jl	APBN
		Pembangunan jalan masuk ke PMU	Terealisasinya pembangunan jalan masuk ke lokasi perwakilan PMU	700 m	105.000.000	Dinas Bina Marga dan Pengairan, Camat Brondong dan Paciran Kepala PPN Brondong , Bappeda	PPN BRONDONG	APBD I
		Pembangunan gedung untuk dolog perikanan serta prasarananya	Terealisasinya Pembangunan gedung untuk dolog perikanan serta prasarananya	600 m2	1.200.000.000	PU Cipta Karya, Dinas Perikanan & Kelautan Kab. Lamongan, Bappeda, Camat Brondong dan Paciran Kepala PPN Brondong, Bappeda	PPN BRONDONG	APBN
		Pembangunan Draenase	Tersedianya draenase di kawasan minapolitan	300 m2	1.385.000.000	Dinas Bina Marga dan Pengairan, Camat Brondong dan Paciran Kepala PPN Brondong , Bappeda	PPN BRONDONG	APBN

Pembangunan IPAL	terealisasinya pembangunan IPAL	1 paket	1.524.000.000	Dinas PU, Bappeda	PPN BRONDONG	APBD I
Pembangunan Lahan Parkir	Tersedianya tempat parkir yang nyaman dan memadai	50 x 150 m^2	1.431.000.000	PU Cipta Karya, Dinas Perikanan & Kelautan Kab. Lamonga, Bappeda	PPI KRANJI Desa Kranji Kec. Paciran	APBD II
Sosialisasi Kegiatan Pembangunan berbasis perikanan Tangkap	Terwujudnya Sosialisasi kegiatan Pembangunan Berbasis perikanan Tangkap	1 Paket	50.000.000	Dinas Perikanan & Kelautan Kab. Lamongan	Dinas Perikanan & Kelautan Kab. Lamongan	APBD II
Pembangunan Kolam Tambat labuh	Tersedianya Kolam Tambat Labuh	30.000 m3	3.000.000.000	Dinas PU Pengairan, Dinas Perikanan & Kelautan Kab. Lamonga, Bappeda	PPI KRANJI Desa Kranji Kec. Paciran	APBN
Pembangunan *cold storage*	Tersedianya cold storage	1 paket	2.500.000.000	Dinas Perikanan dan Kelautan	Kec. Brondong	APBN
Penataan Lansekap PPI Kranji	Tersedianya Kawasan Yang nyaman, dan hijau	1 Unit	200.000.000	PU Cipta Karya, Dinas Perikanan & Kelautan Kab. Lamonga, Bappeda	PPI KRANJI Desa Kranji Kec. Paciran	APBD I
Pembangunan TPI baru yang Higienis	Tersedianya TPI yang Higienis yang memenuhi standart pasar Eropa	3240 m2	6.300.000.000	PU Cipta Karya, Dinas Perikanan & Kelautan Kab. Lamonga, Bappeda	PPI KRANJI Desa Kranji Kec. Paciran	APBN
Pembangunan kantor UPT. Dinas Perikanan dan Kelautan Kec. Paciran	Tersedianya kantor UPT. Dinas Perikanan dan Kelautan Kec. Paciran	100 m2	250.000.000	PU Cipta Karya, Dinas Perikanan & Kelautan, dan Bapeda	PPI KRANJI Desa Kranji Kec. Paciran	APBD II
Pengadaan peralatan kantor (furniture, komputer) dan instalasi showroom	Terealisasinya pengadaan peralatan kantor (furniture, computer) dan instalasi showroom	1 paket	100.000.000	Dinas Perikanan & Kelautan Kab. Lamongan	PPI KRANJI Desa Kranji Kec. Paciran	APBD II
Pemb. Kantor UPT. Dinas Perikanan dan Kelautan Kec. Brondong	Tersedianya Kantor UPT. Dinas Perikanan dan Kelautan Kec. Brondong	100 m2	250.000.000	PU Cipta Karya, Dinas Perikanan & Kelautan, dan Bapeda	Kec. Brondong	APBN / APBD II
Pemb. Kantor UPT. Dinas Perikanan dan Kelautan Kec. Paciran	Tersedianya Kantor UPT. Dinas Perikanan dan Kelautan Kec. Paciran	100 m2	250.000.000	PU Cipta Karya, Dinas Perikanan & Kelautan, dan Bapeda	Kec. Paciran	APBN / APBD II
Pengadaan kendaraan operasional Perikanan Tangkap	Terealisasinya kendaraan untuk operasional Penyuluhan dan Pembinaan bidang Tangkap	1 paket	330.000.000	Dinas Perikanan & Kelautan Kab. Lamongan	Dinas Perikanan & Kelautan Kab. Lamongan	APBD II

	Pendanaan operasional PMU	Terealisasinya penyediaan dana untuk operasional PMU	1 paket	400.000.000	KKP Pusat, Dinas Perikanan & Kelautan Lamongan		APBD I
	Pemb. Jalan CBC dan Rehab. Jalan menuju TPI	Terealisasinya Jalan CBC menuju TPI	1 paket	300.000.000	PU Cipta Karya, Dinas Perikanan & Kelautan, dan Bapeda	PPI KRANJI Desa Kranji Kec. Paciran	APBD II
	Perbaikan dermaga TPI Labuhan Tengah	Terealisasi perbaikan dermaga	1 paket	500.000.000	PU Pengairan, Dinas Perikanan & Kelautan Kab. Lamonga, Bappeda	Desa Labuhan Kec. brondong	APBD II
	Perbaikan dermaga TPI Labuan Barat	terealisasi perbaikan dermaga	1 paket	500.000.000	Dinas PU. Pengairan, Dinas Perikanan & Kelautan Kab. Lamongan, Bappeda	Desa Labuhan Kec. brondong	APBD II
	Pembangunan Jalan Komplek	Tersedianya jalan komplek di kawasan pelabuhan perikanan nusantara brondong	260 m2	5.000.000.000	PPN Brondong	PPN Brondong	APBN
	Pembangunan pintu gerbang	Tersedianya pintu gerbang di kawasan pelabuhan perikanan nusahtara brondong	1 unit	662.000.000	PPN Brondong	PPN Brondong	APBN
	Pembangunan toilet umum	Tersedianya toilet umum yang bersih	unit	490.000.000	PPN Brondong	PPN Brondong	APBN
	Rehabilitasi sungai (pendalaman sungai)	Tersedianya kebutuhan air baku tambak ikan kerapu, udang vanamei dan bandeng	1,5 km x 2 m	300.000.000	Dinas Perikanan Kelautan, Bappeda, Camat Brondong	Desa Labuhan	APBD II
	Pembangunan jalan produksi	Tersedianya sarana jalan produksi yang memadai	2 km x 3 m	400.000.000	Dinas PU Cipta Karya, Bappeda, Camat Brondong	Desa Labuhan	APBD II
		Sub total	**Rp.**	**35.427.000.000**			
KEGIATAN PERIKANAN	Desain paikah serta sarana *handling* ikan untuk kapal contoh	terealisasinya kapal contoh	2 paket	300.000.000	Dinas Perikanan & Kelautan Kab. Lamongan, Bappeda, Camat Brondong dan Paciran Kepala PPN Brondong,	PPI KRANJI	APBD I
	Validasi Data Kapal penangkap Ikan dan Nelayan	Terealisasinya Validasi data Nelayan dan kapal Penangkap Ikan	1 paket	15.000.000	Dinas Perikanan & Kelautan Kab. Lamongan, Bappeda, Camat Brondong dan Paciran	Kec. Brondong dan Kec. Paciran	APBD II

	Pengadaan rumpon Dasar aparteren ikan	Terealisasinya pengadaan rumpon	100 Paket	650.000.000	Dinas Perikanan & Kelautan Kab. Lamongan, Bappeda, Camat Brondong dan Paciran Kepala PPN Brondong,	Kec. Brondong dan Kec. Paciran	APBD I
	Pembuatan Kartu Nelayan	Terealisasinya Kartu Nelayan	10.000 buah	500.000.000	Dinas Perikanan & Kelautan Kab. Lamongan, Bappeda, Camat Brondong dan Paciran Kepala PPN Brondong,	Kec. Brondong dan Kec. Paciran	APBN
	Pengembangan kebutuhan layanan konsultansi usaha perikanan, termasuk kegiatan pengolahan serta diversifikasi produk olahan perikanan	Terealisasinya layanan konsultansi	1 paket	25.000.000	Dinas Perikanan & Kelautan Kab. Lamongan, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jatim, Camat Brondong dan Paciran Kepala PPN Brondong, Bappeda	Dinas Perikanan & Kelautan Kab. Lamongan	APBD II
	Inventarisasi pasar produk tangkap dan hasil olahan	Adanya dokumen pasar peroduk tangkap dan olahan	1 paket	25.000.000	Dinas Perikanan & Kelautan Kab. Lamongan, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jatim, Dinas KOPERINDAG , Camat Brondong dan Paciran Kepala PPN Brondong	Dinas Perikanan & Kelautan Kab. Lamongan	APBD II
	Pengembangan budidaya laut melalui pelatihan	Terselenggaranya pelatihan dengan jumlah peserta 40 orang	1 paket	80.000.000	Dinas Perikanan & Kelautan Kab. Lamongan, Camat Brondong dan Paciran Kepala PPN Brondong, Bappeda	Kec. Brondong dan Kec. Paciran	APBD II
	Pembinaan pasca panen dan pemasaran	Meningkatnya ketrampilan teknis dalam penanganan pasca panen	1 paket	25.000.000	Dinas Perikanan & Kelautan Kab. Lamongan, Dinas KOPERINDAG, Camat Brondong dan Paciran Kepala PPN Brondong	Kec. Brondong dan Kec. Paciran	APBD II
	Pelatihan penanganan ikan dikapal dan saat bongkar di pelabuhan	Terselenggaranya pelatihan dengan jumlah peserta 40 orang	1 paket	50.000.000	Dinas Perikanan & Kelautan Kab. Lamongan, Dinas KOPERINDAG, Camat Brondong dan Paciran Kepala PPN Brondong	Kec. Brondong dan Kec. Paciran	APBD II

repo
AYA
BRAWIJAYA UNIVERSITAS

	Pelatihan permesinan kapal	Terselenggaranya pelatihan dengan jumlah peserta 40 orang	1 paket	50.000.000	Dinas Perikanan & Kelautan Kab. Lamongan, Dinas KOPERINDAG, Camat Brondong dan Paciran Kepala PPN Brondong	Kec. Brondong dan Kec. Paciran	APBD II
	Pelatihan dan pengenalan alat bantu penangkapan (GPS, Fish Finder, FAD)	Terselenggaranya pelatihan dengan jumlah peserta 40 orang	1 paket	50.000.000	Dinas Perikanan & Kelautan Kab. Lamongan, Dinas KOPERINDAG, Camat Brondong dan Paciran Kepala PPN Brondong	Kec. Brondong dan Kec. Paciran	APBD II
	Pelatihan manajemen operasi penangkapan ikan	Terselenggaranya pelatihan dengan jumlah peserta 40 orang	1 paket	50.000.000	Dinas Perikanan & Kelautan Kab. Lamongan, Dinas KOPERINDAG, Camat Brondong dan Paciran Kepala PPN Brondong	Kec. Brondong dan Kec. Paciran	APBD II
	Pelatihan teknik penangkapan ikan	Terselenggaranya pelatihan dengan jumlah peserta 40 orang	1 paket	50.000.000	Dinas Perikanan & Kelautan Kab. Lamongan, Dinas KOPERINDAG, Camat Brondong dan Paciran Kepala PPN Brondong	Kec. Brondong dan Kec. Paciran	APBD II
	Paket alat tangkap ramah lingkungan	Terealisasinya paket alat tangkap untuk 40 nelayan	1 paket	300.000.000	Dinas Perikanan & Kelautan Kab. Lamongan, Dinas KOPERINDAG, Camat Brondong dan Paciran Kepala PPN Brondong	Kec. Brondong dan Kec. Paciran	APBD II
	Pembinaan Pengembangan Usaha Perikanan	terlaksananya pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUB), pembentukan Forum Komunikasi Minabisnis (FORKAM), pelaksanaan temu-temu usaha, pelatihan kewirausahaan	1 paket	50.000.000	Dinas Perikanan & Kelautan Kab. Lamongan, Dinas KOPERINDAG, Camat Brondong dan Paciran Kepala PPN Brondong	Kec. Brondong dan Kec. Paciran	APBD II
	Pengadaan Sarana basket untuk mengangkat hasil tangkapan di TPI Labuan Tengah	terealisasinya basket sebanyak 200 unit	200 unit	30.000.000	Dinas Perikanan & Kelautan Kab. Lamongan, Dinas KOPERINDAG, Camat Brondong dan Paciran Kepala PPN Brondong	Kec. Brondong dan Kec. Paciran	APBD II

	Pengadaan Radio SSB 2 Band sebagai fasilitas komunikasi di TPI Labuan Tengah	terealisasi pengadaan radio SSB	2	150.000.000	Dinas Perikanan & Kelautan Kab. Lamongan, Dinas KOPERINDAG, Camat Brondong dan Paciran Kepala PPN Brondong	Kec. Brondong dan Kec. Paciran	APBD I
	Pengadaan genset di TPI Labuhan Tengah	Terealisasinya pengadaan genst 3000 watt	1	30.000.000	Dinas Perikanan & Kelautan Kab. Lamongan, Dinas KOPERINDAG, Camat Brondong dan Paciran Kepala PPN Brondong	Desa Labuhan Kec. brondong	APBD II
	Pengadaan mesin pompa air untuk TPI Labuhan Tengah	terealisasi pengadaan pompa air	1	50.000.000	Dinas Perikanan & Kelautan Kab. Lamongan, Dinas KOPERINDAG, Camat Brondong dan Paciran Kepala PPN Brondong	Desa Labuhan Kec. brondong	APBD II
	Pengadaan Sarana basket untuk mengangkat hasil tangkapan di TPI Labuhan Barat	terealisasinya basket sebanyak 200 unit	200 unit	30.000.000	Dinas Perikanan & Kelautan Kab. Lamongan, Dinas KOPERINDAG, Camat Brondong dan Paciran Kepala PPN Brondong	Desa Labuhan Kec. brondong	APBD II
	Pengadaan Mesin pembersih lantai di TPI Labuhan Barat	terealisasi pengadaan mesin pembersih	1	2.500.000	Dinas Perikanan & Kelautan Kab. Lamongan, Dinas KOPERINDAG, Camat Brondong dan Paciran Kepala PPN Brondong	Desa Labuhan Kec. brondong	APBD II
	Pengadaan genset di TPI Labuhan Barat	Terealisasinya pengadaan genset 3000 watt	1	30.000.000	Dinas Perikanan & Kelautan Kab. Lamongan, Dinas KOPERINDAG, Camat Brondong dan Paciran Kepala PPN Brondong	Desa Labuhan Kec. brondong	APBD II
	Pengadaan timbangan	terealisasi pengadaan timbangan	6 Paket	300.000.000	Dinas Perikanan & Kelautan Kab. Lamongan, Dinas KOPERINDAG, Camat Brondong dan Paciran Kepala PPN Brondong	Semua TPI di kab. Lamongan	APBD I

		Pengembangan sistem informasi data perikanan tangkap	Format pengisian data perikanan dilengkapi dengan *software* dan peralatan *hardware* yang mendukung baik pada tingkat PMU maupun KKP	1 paket	100.000.000	Dinas Perikanan & Kelautan Kab. Lamongan, Dinas KOPERINDAG, Bagian Perekonomian Setda dan KPDE, Camat Brondong dan Paciran Kepala PPN Brondong	Dinas Perikanan & Kelautan Kab. Lamongan	APBD I
		Peningkatan peran kelembagaan ekonomi	BRI, BUMN, BANK JATIM, KUD, Swasta dan investor lain memberikan peluang akses terutama bagi nelayan dan masyarakat miskin	1 paket	45.000.000	Dinas Perikanan & Kelautan Kab. Lamongan, Dinas KOPERINDAG, Bagian Perekonomian Setda dan KPDE, Camat Brondong dan Paciran Kepala PPN Brondong	Dinas Perikanan & Kelautan Kab. Lamongan	APBD II
		Pembuatan Profil Lembaga Organisasi Lokal	Tersedianya data kelompok usaha ekonomi produktif yang jelas dan terukur	1 paket	50.000.000	Dinas Perikanan & Kelautan Kab. Lamongan, Dinas KOPERINDAG, Bagian Perekonomian Setda	Dinas Perikanan & Kelautan Kab. Lamongan	APBD II
			Sub Total	Rp.	**500.000.000**			
			TOTAL TAHUN 2012	**Rp.**	**38.969.500.000**			

Lampiran 9. Data Mentah Analisis Deskriptif

Responden	item pertanyaan				
	p1	p2	p3	p4	p5
1	0	0	0	0	1
2	1	0	0	1	1
3	0	1	1	0	0
4	1	1	1	1	0
5	0	0	1	1	0
6	1	1	0	0	1
7	0	0	1	0	0
8	1	1	0	0	0
9	0	1	0	1	0
10	0	0	0	0	1
11	1	0	0	1	0
12	0	0	0	0	0
13	0	0	1	0	1
14	1	0	1	0	0
15	0	0	1	0	1
16	1	1	0	1	0
17	0	0	1	1	1
18	0	1	0	1	0
19	1	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0
21	0	0	1	1	0
22	0	0	0	0	0
23	1	0	0	1	1
24	0	0	0	0	0
25	1	0	0	0	1
26	0	1	0	0	1
27	0	0	1	0	0
28	0	1	0	0	0
29	0	0	1	0	1
30	0	0	0	0	0

Ya	10	9	11	10	11
%	33.33%	30.00%	36.67%	33.33%	36.67%
Tidak	20	21	19	20	19
%	66.67%	70.00%	63.33%	66.67%	63.33%

Item pertanyaan	Ya		Tidak	
	Jumlah	%	Jumlah	%
p1	10	33.33	20	66.67
p2	9	30.00	21	70.00
p3	11	36.67	19	63.33
p4	10	33.33	20	66.67
p5	11	36.67	19	63.33

10
33.33%

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Lampiran 8. Data Mentah Analisis IPA

Tabel…..

Tingkat Kepentingan dan Kepuasan Terhadap Program Pengembangan Kawasan Minapolitan

No	Variabel	Tingkat Kepentingan (Y)					Bobot Skor	Nilai X	Tingkat Kepuasan (X)					Bobot SkoR (Xi)	Nilai Y	% Tingkat Kesesuaian
		4	3	2	1				4	3	2	1				
1.	Pembangunan Breakwater	7	21	2	0	2.7	95	3.2	0	20	10	0	3.2	80	2.7	84.2%
2.	Pavingstone Jalan Pesisir Kec.Pac	5	24	1	0	2.5	94	3.1	0	15	15	0	3.1	75	2.5	79.8%
3.	Perencanaan, Pengawasan dan Pemborongan Jalan	2	27	1	0	2.5	91	3.0	0	14	16	0	3.0	74	2.5	81.3%
4.	Pengadaan Rumpon Dasar	11	19	0	0	2.8	101	3.4	0	23	7	0	3.4	83	2.8	82.2%
5.	Pembinaan KUB Perikanan Tangkap	5	25	0	0	3.0	95	3.2	4	23	3	0	3.2	91	3.0	95.8%
6.	Pengadaan Timbangan Ikan	11	19	0	0	3.2	101	3.4	5	25	0	0	3.4	95	3.2	94.1%
7.	Rehabilitasi Breakwater	4	26	0	0	2.7	94	3.1	0	22	8	0	3.1	82	2.7	87.2%
8.	Pembangunan Kantor POKMASWAS	3	22	5	0	2.8	88	2.9	0	23	7	0	2.9	83	2.8	94.3%
9.	Pemborongan Pengadaan Instalasi Listrik	6	24	0	0	1.0	96	3.2	0	0	0	30	3.2	30	1.0	31.3%
10.	Pengadaan Alat Tangkap Perikanan (Bubu)	4	20	6	0	2.7	88	2.9	2	16	12	0	2.9	80	2.7	90.9%
11.	Pengadaan Payang Teri	9	18	3	0	2.7	96	3.2	0	21	9	0	3.2	81	2.7	84.4%
12.	Review Masterplan	1	26	3		2.6	88	2.9	0	17	13	0	2.9	77	2.6	87.5%

13.	Pengadaan Peralatan Pendukung PPDI (Paket 1)	5	25	0	0	2.6	95	3.2	0	18	12	0	3.2	78	2.6	82.1%
14.	Pengadaan Peralatan Pendukung PPDI (Paket 2)	4	26	0	0	2.5	94	3.1	0	16	14	0	3.1	76	2.5	80.9%
						2.6							3.1			